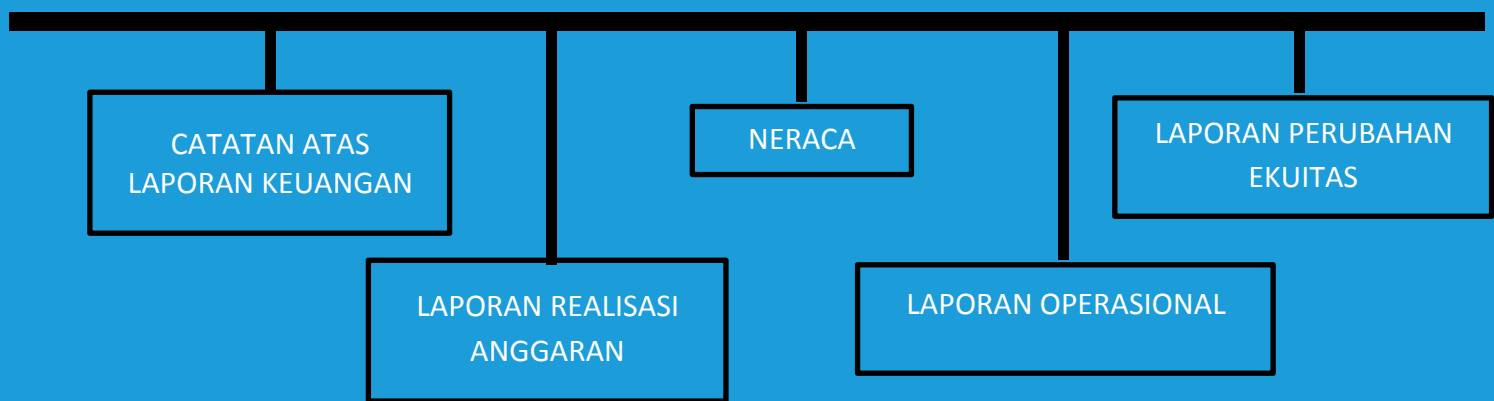


LAPORAN KEUANGAN AUDIT

DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA
KOTA BANJARBARU



BAB I PENDAHULUAN



1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada periode pelaporan untuk kepentingan :

a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam periode laporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat

c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan yang disusun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru menyajikan informasi yang bermanfaat dan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru dengan :

- a) Menyediakan informasi / data mengenai jumlah pendapatan yang bisa dicapai.
- b) Menyediakan informasi / data mengenai jumlah pengeluaran yang bisa dicapai.
- c) Menyediakan informasi / data guna mengevaluasi hasil-hasil yang telah dicapai selama satu periode laporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut maka di dalam laporan keuangan menyediakan informasi mengenai Pendapatan, Belanja, dan Aset Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru.

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru terdiri dari :

1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sebagai berikut :

- a) Pendapatan
- b) Belanja
- c) Surplus/ defisit Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

2 Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Aset diklasifikasikan dalam aset lancar dan non lancar. Neraca mencantumkan pos-pos berikut :

- a) Kas dan setara kas
- b) Piutang Pajak dan bukan pajak
- c) Persediaan
- d) Aset Tetap
- e) Ekuitas Dana

3 Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan LO, beban, dan surplus/ defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.

Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.

4 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE menyajikan sekurang-kurang pos-pos ekuitas awal, surplus/ defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi- koreksi yang berlangsung menambah/ mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.

5 Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan disajikan dengan susunan sebagai berikut:

- a) Pendahuluan yang berisi maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.
- b) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
- c) Kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan ini didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 28 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru
11. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru
12. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 81 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banjarbaru
13. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017

1.3 Sistematika Penulisan Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Laporan Keuangan disusun dalam 7 Bab yaitu :

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada Pemerintah Daerah

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

5.1 Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1 Pendapatan-LRA

5.1.2 Belanja

5.1.3 Surplus/Defisit-LRA

5.1.4 Pembiayaan

5.1.5 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran

5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

5.2.2 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih

5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya dan

5.2.5 Lain-Lain

5.2.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir

5.3 Neraca

5.3.1 Aset Lancar

5.3.2 Investasi Jangka Panjang

5.3.3 Aset Tetap

5.3.4 Aset Lainnya

5.3.5 Kewajiban

5.3.6 Ekuitas Dana

5.4 Laporan Operasional

5.4.1 Pendapatan-LO

5.4.2 Beban

5.4.3 Surplus/Defisit-LO

5.5 Laporan Perubahan Ekuitas

5.6.1 Ekuitas Awal

5.6.2 Surplus/Defisit-LO

5.6.3 Koreksi-Koreksi

5.6.4 Ekuitas Akhir

BAB VI Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan

BAB VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD



2.1 Ekonomi Makro

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu alat ukur yang dapat memberikan gambaran keberhasilan pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan, khususnya di bidang ekonomi adalah tersedianya data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan PDRB dapat diketahui tingkat pertumbuhan ekonomi, struktur perekonomian daerah dan juga tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah. Selain itu, data PDRB juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi, analisa dan perencanaan yang nantinya dapat digunakan untuk menentukan sasaran pembangunan di masa mendatang.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Selain itu, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pembangunan ekonomi.

Kontribusi lapangan usaha di bidang Informasi dan Komunikasi di era globalisasi sangat vital dan menjadi salah satu indikator kemajuan bangsa. Perkembangan kategori informasi dan komunikasi di Kota Banjarbaru dan daerah-daerah lainnya tidak lepas dari perkembangannya secara nasional. Kategori lapangan usaha informasi dan komunikasi menjadi salah satu indikasi/proksi mengenai sampai sejauh mana kemajuan teknologi yang ada di suatu wilayah. Pangsa kategori lapangan usaha informasi dan komunikasi di Kota Banjarbaru sebesar 4,72 persen selama tahun 2017.

Pertumbuhan kategori lapangan usaha dan informasi mencapai 8,73 persen selama tahun 2017. Pertumbuhan ini salah satunya disebabkan oleh maraknya penggunaan gadget dan pertumbuhan kelas menengah disinyalir menjadi salah satu pendorong pertumbuhan kelas menengah disinyalir menjadi salah satu

pendorong pertumbuhan kategori lapangan usaha informasi dan komunikasi. Kebutuhan akan informasi dan komunikasi akan terus meningkat, dan akan memberikan dampak pada produktivitas dunia usaha.

Selain faktor pendorong yang telah disebut, kinerja lapangan usaha informasi dan komunikasi di Kota Banjarbaru juga tidak luput dari peningkatan animo masyarakat untuk mendapatkan hiburan (video shooting perayaan acara), serta peningkatan permintaan percetakan, baik digital printing maupun surat kabar. Selain itu, maraknya bisnis secara online diduga juga berpengaruh terhadap pertumbuhan sub sektor komunikasi karena akan semakin meningkatkan kegiatan pengiriman paket baik oleh perusahaan pos Indonesia maupun perusahaan swasta lainnya.

Tabel 2.1
 Nilai Tambah Bruto, Pertumbuhan dan Peranan Kategori Informasi dan Komunikasi Tahun 2017

Subsektor	Nilai Tambah Bruto (Ribu Rp)	Pertumbuhan (%)	Peranan Thd Total PDRB (%)	Struktur Sektor Industri Pengolahan (%)
Informasi dan Komunikasi	373.629	8,73	4,70	100,00
Informasi dan Komunikasi	373.629	8,75	4,70	100,00

Sumber Data : PDRB Kota Banjarbaru Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017

2.2 Kebijakan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan berbagai program yang paling efektif dalam mencapai sasaran.

Perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus

berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kota Banjarbaru menetapkan rangkaian program sesuai dengan Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pilihan serta urusan penunjang pemerintahan yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

Sejalan dengan kewenangan dalam mengatur dan mengurus rumah tangga bagi daerah, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan peningkatan pendapatan daerah semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi ke daerah dalam jumlah besar. Daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya untuk meningkatkan Akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur Pendapatan Asli Daerah yang utama.

2.2.1 Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan pengelolaan belanja daerah dimaksudkan untuk menjamin agar seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan yang dialokasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dapat dibiayai oleh APBD. Disamping itu kebijakan pengelolaan belanja daerah harus dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan penetapan prioritas serta kebijakan alokasi anggaran program dan kegiatan pembangunan.

Pengalokasian anggaran ditujukan untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan masyarakat yang dijabarkan ke dalam dua puluh enam urusan wajib dan tujuh urusan pilihan dengan tetap mengacu kepada prinsip partisipasi masyarakat, keadilan anggaran, serta efisiensi dan efektivitas dalam rangka mewujudkan terciptanya tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun 2018 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Tujuannya untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan.

Melihat pertumbuhan belanja lebih tinggi dari pertumbuhan pendapatan sehingga Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu (SILPA) cenderung tiap tahunnya menurun, maka kebijakan umum pengelolaan belanja daerah pada tahun 2018 ini akan tetap melanjutkan kebijakan-kebijakan tahun sebelumnya dengan tetap memperhitungkan kemampuan keuangan daerah tahun 2018, yaitu sebagai berikut :

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

2. Prioritas

Penggunaan anggaran tahun 2018 diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, peningkatan infrastruktur guna mendorong peningkatan ekonomi masyarakat. Disamping itu pengalokasian anggaran tahun 2018 tetap mendanai kegiatan-kegiatan yang merupakan prioritas agenda pembangunan Kota Banjarbaru.

3. Tolok Ukur dan Target Kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sehingga alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur.

4. Optimalisasi Belanja Langsung

Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih

baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik yang memungkinkan dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta. Selanjutnya pada tahun 2018 ini alokasi anggaran belanja untuk bidang pendidikan akan tetap dipertahankan minimal sebesar 20% dari total belanja dan alokasi anggaran belanja untuk bidang kesehatan akan ditingkatkan pada akhirnya akan menjadi 10% dari total belanja.

5. Transparan dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.

6. Kesesuaian Kegiatan dengan Sumber Pembiayaan

Alokasi anggaran belanja untuk kegiatan-kegiatan yang sudah jelas sumber pembiayaannya seperti dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBH CHT), Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Hibah harus sudah seimbang dengan target penerimaannya dan sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana tersebut.

7. Optimalisasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Dengan terbatasnya sumber-sumber pendanaan APBD Pemerintah Kota Banjarbaru maka pada tahun 2018 akan diupayakan kegiatan-kegiatan yang telah dibiayai dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan tidak lagi dibiayai dari APBD atau melakukan pembiayaan dengan pola *cost sharing* antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Pemerintah Kota Banjarbaru. Hal ini dimaksudkan agar dana yang semula dialokasikan untuk kegiatan yang sama dapat dialihkan untuk membiayai kegiatan lain yang masih prioritas disamping itu juga untuk mengurangi defisit anggaran tahun 2018.

8. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Setiap pengalokasian anggaran belanja dalam APBD tahun 2018 tetap mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga seluruh alokasi anggaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh pengguna anggaran.

Meningkatkan pemanfaatan pembiayaan kegiatan Pemerintah Daerah dari sumber pendanaan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang ada di Kota Banjarbaru.

2.2.2 Kebijakan Umum Anggaran

Kebijakan Umum Anggaran Pemerintah Kota Banjarbaru adalah meningkatkan manajemen pembiayaan daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, dan efektivitas sumber-sumber pembiayaan. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, apabila APBD dalam keadaan surplus, maka kebijakan yang diambil adalah peningkatan saldo kas daerah dalam bentuk giro, deposito, penyertaan modal atau pembentukan dana cadangan untuk tujuan tertentu atau pemberian pinjaman daerah. Apabila APBD dalam keadaan defisit maka kebijakan yang dilaksanakan adalah memanfaatkan penerimaan pembiayaan secara optimal seperti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah dan penerimaan piutang daerah.

2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru dirinci dalam rencana kinerja dan rencana anggaran. Rencana kinerja adalah kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru untuk merubah keadaan dari buruk menjadi baik atau dari baik menjadi lebih baik dengan tingkat capaian yang terukur. Dengan telah ditetapkannya target capaian dari rencana kinerja ini maka akan memudahkan dalam pengukuran kinerja.

Rencana kinerja berisikan sasaran indikator keluaran digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2 Target dan Capaian Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan Informasi Tahun 2018

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	KET
	Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Publik menggunakan TIK	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan menggunakan TIK	Nilai Aspek SPBE	2	Menunggu nilai dari kemenpan		
		Meningkatnya konektifitas penyelenggaraan pemerintahan TIK	Prosentase unit kerja yang penyelenggaraan pemerintahan menggunakan koneksi jaringan Diskominfo	28%	42,88	153%	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan TIK	Prosentase SKPD yang telah menggunakan layanan persandian Diskominfo	31,23%	33%	105,66%	

			Prosentase unit kerja yang telah menggunakan layanan LPSE	100%	100%	100%	
			Prosentase pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti menggunakan aplikasi LAPOR!	100%	100%	100%	
		Meningkatnya kualitas layanan informasi publik	Prosentase pemberdayaan KIM	100%	100%	100%	
			Prosentase informasi pembangunan Kota Banjarbaru yang dapat diakses skala regional/nasional	100%	100%	100%	
			Prosentase isu publik yang dijadikan bahan analisis kebijakan pimpinan	100%	100%	100%	
			Prosentase unit kerja yang menyampaikan informasi publik melalui website SIP-PPID	80%	83,33%	104,16%	
			Prosentase data/informasi statistik sektoral yang update	100%	100%	100%	

Tabel 2.3 Realisasi Kinerja dan Anggaran Terhadap Pencapaian Sasaran Strategis

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA (2018)			ANGGARAN			KET.
				TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	
	Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik menggunakan TIK	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan menggunakan TIK	Nilai Aspek SPBE	2	xxxx	100%	Rp. 75.623.700	Rp.31.673.500	41.88%	
		Meningkatnya konektivitas penyelenggaraan pemerintahan menggunakan TIK	Prosentase Unit Kerja yang penyelenggaraan pemerintahan menggunakan koneksi jaringan Diskominfo	28%	42,98 %	153%	Rp.5.932.688.880	Rp. 5.665.325.155,81	95,49%.	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan menggunakan TIK	Prosentase SKPD yang telah menggunakan layanan persandian Diskominfo	31,23 %	33%	105%	Rp. 202.628.000	Rp. 135.591.250	66,92%	
			Prosentase unit kerja yang telah menggunakan layanan LPSE	100%	100%	100%	Rp. 221.438,500	Rp. 217.471.500	98,21%	
			Prosentase pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti menggunakan aplikasi LAPOR!	100%	100%	100%	Rp. 40.000.000	Rp. Rp. 40.000.000	100%.	

		Meningkatnya kualitas layanan informasi publik	Prosentase pemerbadayaan KIM	30%	100%	100%	Rp.90.262.500	Rp. 90.184.669	99,91 %.	
			Prosentase informasi pembangunan kota banjarbaru yang didapat diakses skala regional/nasional	1	1	100%	Rp. 29.804.000	Rp. 29.781.150	99,92 %	
			Prosentase isu publik yang dijadikan bahan analisis kebijakan pimpinan	100%	100%	100%				
			Prosentase unit kerja yang menyampaikan informasi publik melalui website SIP-PPID	80%	83,33 %	104%	Rp.35.044.900	Rp.34.944.900	99,71 %	
			Prosentase data/informasi statistik sektoral yang update	100%	100%	100%	Rp.156.599.225	Rp.156.599.000.	99,99 %	

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN



3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru pada tahun 2018 mendapat dukungan dana sebesar Rp. 11.679.662.280,- yang terbagi atas Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.1 Sumber Dana Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Uraian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.328.081.030,00	3.160.981.906,00	94,98
2	BELANJA LANGSUNG	8.351.581.250,00	7.771.032.719,81	93,05
	APBD	11.679.662.280,00	10.932.014.625,81	93,60
	JUMLAH	11.679.662.280,00	10.932.014.625,81	93,60

Realisasi penyerapan anggaran belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru hingga akhir Tahun 2018 yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah sebesar 10.932.014.625,81 atau terealisasi sebesar 93,60% dengan demikian jumlah anggaran belanja yang tidak dapat diserap sebesar Rp.747.647.654,19 atau 6,40%.

Pos belanja ini terdiri dari belanja-belanja sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai (Belanja Tidak Langsung) sebesar Rp. 3.160.981.906,00 atau 94,98% dari total anggaran.
2. Belanja Langsung sebesar Rp. 7.771.032.719,81 atau 93,05% dari total anggaran, yang terdiri dari :
 - a. Belanja Pegawai sebesar Rp. 363.330.000,00 atau 88,96% dari total anggaran.
 - b. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 2.343.950.742,00 atau 87,68 % dari total anggaran dan Belanja Modal sebesar Rp. 5.058.751.977,81 atau 96,10% dari total anggaran.

Adapun rinciannya kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.2. Anggaran dan Realisasi Belanja per Kegiatan Tahun 2018

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	SALDO	%
Non Program	Rp 3,328,081,030	Rp 3,160,981,906	Rp 167,099,124	94.98%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1,076,824,595	Rp 801,375,960	Rp 182,525,920	74.42%
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 120,412,000	Rp 86,886,616	Rp 31,991,615	72,16%
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp 14,400,000	Rp 14,400,000	Rp -	100%
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 30,736,800	Rp 30,666,800	Rp 70,000	99,77%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 19,332,400	Rp 18,907,000	Rp 425,400	97.79%
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 7,840,450	Rp 7,829,000	Rp 11,450	99.85%
Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Rp 6,361,200	Rp 6,208,000	Rp 153,200	97.59%
Penyediaan makanan dan minuman	Rp 103,215,000	Rp 95,955,000	Rp 7,260,000	92.96%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp 469,846,745	Rp 394,029,658	Rp 75,817,087	83,86%
Penyediaan jasa non PNS	Rp 304,680,000	Rp 290,630,000	Rp 14,050,000	95.38%
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp 286,096,550	Rp 243,618,131	Rp 42,478,419	85,15%
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Rp 37,982,000	Rp 31,710,000	Rp 3,572,000	83,49%
Pengadaan peralatan gedung kantor	Rp 57,717,000	Rp 53,808,100	Rp 3,908,000	93,23%
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Rp 30,238,500	Rp 25,711,300	Rp 4,527,200	85,03%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp 56,983,000	Rp 33,038,731	Rp 23,944,269	57,98%
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Rp 22,188,500	Rp 22,100,000	Rp 228,500	99,60%
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Rp 16,674,700	Rp 14,200,000	Rp 2,474,000	85,16%
Pemeliharaan gedung kantor	Rp 64,312,850	Rp 63,050,000	Rp 1,262,800	89,04%
Program peningkatan disiplin aparatur	Rp 11,500,000	Rp 11,500,000	Rp -	100%
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Rp 11,500,000	Rp 11,500,000	Rp -	100%
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp 31,998,000	Rp 30,485,100	Rp 1,512,900	95,27%
penyusunan perencanaan dan pelaporan keuangan	Rp 24,309,400	Rp 22,796,500	Rp 1,134,900	93.78%
perencanaan dan pelaporan manajemen aset/barang	Rp 7,688,600	Rp 7,688,600	Rp -	91.58%
Program Layanan Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Pemanfaatan TIK	Rp 5,767,918,880	Rp 5,507,855,155.81	Rp 260,063,724.19x	95,49%
Penyelenggaraan Akses Internet dan Intranet Pemerintah daerah	Rp 343,400,000	Rp 322,869,488	Rp 20,530,512	94,02%
Penyelenggaraan Infrastruktur dasar data center, disaster recovery dan TIK	Rp 5,354,998,880	Rp 5,158,439,667,81	Rp 196,559,213,19	96,32%
Penyelenggaraan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi	Rp 69,520,000	Rp 26,546,000	Rp 42,974,000	38,18%
Program Layanan Penyediaan Informasi Publik Pemerintah Daerah	Rp 40,000,000	Rp 40,000,000	Rp -	100%
Pemantauan Isu Publik, Pendapat Umum dan Aduan Masyarakat	Rp 40,000,000	Rp 40,000,000	Rp -	100%
Program Layanan Penyelenggaraan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Rp 155,112,300	Rp 154,910,749	Rp 201,352	99,87%
Fasilitas dan Konsultasi Sumber daya komunikasi publik	Rp 90,262,500	Rp 90,184,699	Rp 77,601	99,91%
Pengelola dan pemetaan saluran komunikasi	Rp 29,804,900	Rp 29,781,150	Rp 23,750	99,92%

publik				
Pelayanan permintaan informasi publik	Rp 35,044,900	Rp 34,944,900	Rp 100,000	99,71%
program pengembangan data/informasi	Rp 156,599,225	Rp 156,599,000	Rp 225	99,99%
Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan dokumen perencanaan	Rp 75,889,800	Rp 75,889,800	Rp -	100%
penyusunan dan analisis data /informasi perencanaan pembangunan ekonomi	Rp 60,835,625	Rp 60,835,400	Rp 225	99,99%
penyusunan profil daerah	Rp 19,873,800	Rp 19,873,800	Rp -	100%
Program Pengembangan Persandian Nasional	Rp 107,628,000	Rp 48,691,250	Rp 58,936,750	45,24%
pembinaan penyelenggaraan persandian	Rp 50,260,000	Rp 19,105,250	Rp 31,154,750	38,01%
pengembangan dan pengelolaan sistem keamanan informasi berklasifikasi	Rp 43,118,000	Rp 22,622,000	Rp 20,496,000	52,46%
perencanaan dan pengembangan kebijakan persandian	Rp 14,613,000	Rp 6,964,000	Rp 7,286,000	47,65%
Program layanan penjaminan kedaulatan informasi pemerintah daerah	Rp 483,613,700	Rp 448,467,260	Rp 35,146,440	92.73%
penyelenggaraan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan di lingkungan pemerintah daerah	Rp 95,000,000	Rp 86,900,000	Rp 8,100,000	91,47%
penyelenggaraan website lembaga, pelayanan publik dan kegiatan pemerintah kabupaten/kota	Rp 382,510,000	Rp 356,439,760	Rp 26,070,240	93.18%
Perumusan regulasi, kebijakan dan monev di bidang naman domain, sub domain serta website dan konten	Rp 6,103,700	Rp 5,127,500	Rp 976,200	84,01%
Program layanan Peningkatan kualitas layanan publik Pemerintah Daerah melalui pemanfaatan TIK	Rp 234,290,000	Rp 184,016,000	Rp 51,274,000	78,54%
Promosi dan Sosialisasi layanan publik berbasis elektronik	Rp 234,290,000	Rp 184,016,000	Rp 51,274,000	78,54%
TOTAL	Rp 11,679,662,280	Rp 10,932,392,625.81	Rp 747,229,954,19	93,60%

3.2 Hambatan dan Kendala Penyerapan Anggaran Dikaitkan dengan Pencapaian Kinerja yang Telah Ditetapan

Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru di tahun 2018 yang tidak terserap adalah sebesar 6,40% atau Rp. 747.229.954,19. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal :

1. Kendala dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi di tahun 2018 adalah :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada kegiatan **penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**, penyerapan anggaran 72,16%. Hal ini karena pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik setiap bulannya tidak dapat diprediksi. Pada kegiatan ini terdapat nilai efisiensi sebesar 27,84%.

b. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kendala :

Pada kegiatan **pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional** penyerapan anggaran hanya 57,98%. Hal ini disebabkan karena kerusakan tidak dapat diprediksi, sedangkan pemeliharaan sudah di realisasikan.

Solusi :

Sering mengecek kendaraan dinas/operasional agar bisa lebih terawat dan terpelihara.

c. Program Layanan Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui pemanfaatan TIK

Pada kegiatan **Penyelenggaraan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi**, penyerapan anggaran 38,18%. Karena yang paling mempengaruhi capaian keuangan kegiatan kurang dari 50% adalah:

- Belum terbentuknya Tim SPBE sehingga anggaran honor dan makan minum penunjang kegiatan berkaitan dengan pelaksanaan Tim SPBE tidak digunakan hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi dalam rencana pembentukan Tim tersebut.
- Untuk belanja modal perangkat aplikasi mobile tidak digunakan karena pagu yang dianggarkan tidak memenuhi harga pasaran perangkat aplikasi mobile yang dibutuhkan dalam menunjang kegiatan

Solusi :

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perlu dilakukan :

- Meningkatkan kordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka mewujudkan pembentukan Tim SPBE.
- Melakukan survey harga dan ketersediaan perangkat yang dibutuhkan sebelum menganggarkan keuangan.

d. Program Pengembangan Persandian Nasional

Kendala :

Pada **Program Pengembangan Persandian Nasional** penyerapan anggaran hanya 45,24% hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terdapat kendala penyesuaian jadwal operasional dengan kegiatan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengingat instansi tersebut baru saja berubah nama dari Lembaga Sandi Negara

(Lemsaneg) menjadi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada awal tahun 2018, jadi banyak penjadwalan pelaksanaan sosialisasi yang terbentur dengan daerah lain se Indonesia dan juga mengenai pembiayaan Perjalanan Dinas Narasumber yang di bebaskan ke daerah sedangkan untuk pembiayaan di daerah terbatas serta keterbatasan kompetensi dan kuantitas SDM di Bidang Keamanan Informasi. Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Persandian 38,01%, kegiatan Pengembangan dan pengelolaan sistem keamanan informasi berklasifikasi 52,46% dan kegiatan perencanaan dan pengembangan kebijakan persandian 47,65%.

Solusi :

- Mengintensifkan koordinasi dengan instansi vertikal pengampu bidang persandiaan BSSN dan konsul dengan Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten lain.
- Menambah SDM terkait bidang persandian dalam rangka pengamanan Informasi bisa melalui pengiriman peserta diklat atau pengadaan SDM yang berkualifikasi bidang persandian dalam rangka pengamanan informasi.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI



Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Pemerintah Kota Banjarbaru memiliki kebijakan akuntansi yang sudah ditetapkan secara formal terkait dengan perlakuan akuntansi dalam sistem pencatatan administrasi pengelolaan keuangan daerah yaitu Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Pada tanggal 29 November 2017, beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banjarbaru diubah melalui Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 81 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banjarbaru. Peraturan ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat(5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Tanggung jawab laporan keuangan berada di pusat pimpinan entitas. Dalam aktivitas laporan keuangan, entitas dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi

dalam hal ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Banjarbaru.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dengan terbitnya Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2015, maka Pemerintah Kota Banjarbaru resmi menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2017. Agar dapat menyajikan keterbandingan laporan keuangan, Pemerintah Kota Banjarbaru perlu menyajikan kembali Neraca dan laporan Arus Kas (LAK) tahun sebelumnya.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh SKPD.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

4.3.1 Pengukuran Pendapatan

Pendapatan diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan secara bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan biaya operasional atau pengeluaran). Dalam penerapannya, pendapatan dipilah menjadi 2 (dua), yakni :

1) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui setelah diterbitkan penetapan Surat Keputusan atas pendapatan terkait atau pada saat

pendapatan direalisasi.

2) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan-LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD.

4.3.2. Pengukuran Beban dan Belanja

Terdapat 2 (dua) definisi terkait pengeluaran pemerintah daerah dimana dalam LRA disebut dengan belanja, sedangkan dalam LO disebut dengan beban.

1) Beban

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan.

2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui berdasarkan basis akuntansi kas dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

4.3.3. Pengukuran Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Transfer masuk atau keluar diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima atau keluar di Rekening Kas Umum Daerah. Sedangkan dana transfer diukur dan dicatat berdasarkan hasil rekonsiliasi dana transfer pada akhir tahun.

4.3.4. Pengukuran Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah didasarkan pada nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Sedangkan untuk pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan

4.3.5. Pengukuran Kas dan Setara Kas

Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Kota Banjarbaru. Kas juga meliputi seluruh uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca atau Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca, serta potongan pajak yang belum disetorkan hingga tanggal neraca. Saldo simpanan di bank yang termasuk dalam kategori kas adalah saldo simpanan atau rekening di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Sedangkan Setara Kas merupakan investasi jangka pendek yang mempunyai masa jatuh tempo dibawah 3 (tiga) bulan yang sangat liquid dan siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

4.3.6. Pengukuran Piutang

Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain, dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

- 1) Piutang Pajak / Piutang Retribusi

Piutang pajak / piutang retribusi dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak atau retribusi daerah yang pembayarannya belum diterima sampai akhir periode akuntansi.

2) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Pemerintah daerah seringkali melakukan penjualan aset tetap yang dimiliki, misalnya lelang kendaraan roda 4 (empat) atau penjualan angsuran rumah dinas. Biasanya penjualan dilakukan kepada pegawai dengan cara mengangsur. Penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya dan biasanya diangsur lebih dari 12 (dua belas) bulan disebut sebagai tagihan penjualan angsuran.

Bagian lancar tagihan penjualan angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang kedalam piutang jangka pendek. Reklasifikasi ini karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Reklasifikasi ini dilakukan untuk penyusunan neraca karena pembayaran atas tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo dalam kurun waktu satu tahun atau kurang diakui sebagai bagian lancar tagihan penjualan angsuran.

Bagian lancar tagihan penjualan angsuran dicatat sebesar nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun. Untuk mendapatkan saldo bagian lancar tagihan penjualan angsuran, pada saat penyusunan neraca dihitung berapa bagian dari tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo dalam tahun depan.

3) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan Negara/Daerah, wajib mengganti kerugian tersebut. Sejumlah kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut dikenal dengan istilah Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Bagian lancar TP/TGR merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berikutnya. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan neraca karena penerimaan kembali dari TP/TGR akan mengurangi akun TP/TGR bukan bagian lancar TP/TGR. TP/TGR yang harus diterima dalam waktu satu tahun diakui sebagai bagian lancar TP/TGR. Bagian lancar TGR dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah

rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun. Untuk mendapatkan saldo bagian lancar TGR.

Pada saat penyusunan neraca perlu dihitung berapa bagian dari TGR yang akan jatuh tempo tahun depan.

4) Piutang Lainnya

Akun piutang lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang diluar bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar pinjaman kepada BUMN/D, Bagian lancar tuntutan perbendaharaan, bagian lancar tuntutan ganti rugi, dan piutang pajak. Piutang lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

5) Piutang Tak Tertagih

Piutang tak tertagih adalah bagian dari piutang yang tidak dapat diselesaikan pembayarannya oleh pihak ketiga. Perlakuan akuntansi terhadap piutang tak tertagih adalah dihapuskan pada tahun anggaran bersangkutan dengan mengurangi jumlah piutang dan mengurangi jumlah ekuitas dana lancar.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, oleh karenanya terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dilakukan penyisihan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Aset berupa piutang di neraca disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), oleh karena itu nilai piutang tidak tertagih merupakan cadangan yang harus terbentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang yang didasarkan pada umur piutang dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu: Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.
- 2) Penyajian Nilai piutang tidak tertagih akan dicantumkan dalam laporan keuangan pada catatan atas laporan keuangan selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 3) Besarnya prosentase penyisihan piutang tidak tertagih yang didasarkan pada umur piutang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Piutang lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 5% (lima persen);
 - b. Piutang kurang lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 10% (sepuluh persen);

- c. Piutang diragukan, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 50% (lima puluh persen);
 - d. Piutang macet, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 100% (seratus persen).
- 4) Jurnal untuk mencatat penyisihan piutang bukan merupakan beban belanja, tetapi merupakan pengurang agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- 5) Penyajian penyisihan piutang di neraca merupakan unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan.
- 6) Pemberhentian pengakuan atas piutang dapat dilakukan dengan cara:
- a) Pelunasan (membayar tunai) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
 - b) Penghapusbukuan (*write down*)

Penghapusbukuan piutang merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Kriteria penghapusbukuan adalah sebagai berikut:

- (1) Penghapusbukuan harus memberi manfaat yang lebih besar dari pada kerugian penghapusbukuan.
- (2) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah, apabila perlu sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
- (3) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan Walikota yang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku. Pengambilan keputusan penghapusbukuan dilakukan berdasarkan suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

c) Penghapustagihan (*write off*)

Penghapustagihan dilakukan dengan mempertimbangkan konsekuensi ekonomi, kemungkinan hilangnya hak tagih dan atau menerima tagihan. Penghapustagihan piutang harus berdasarkan kriteria, prosedur dan kebijakan yang

menghasilkan keputusan hapus tagih bagi pemerintah daerah secara hukum dan ekonomi.

Kriteria penghapusan tagihan sebagai berikut:

- (1) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada Negara.
 - (2) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik.
 - (3) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
 - (4) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang.
 - (5) Penghapustagihan setelah cara penagihan gagal atau tidak mungkin diterapkan.
 - (6) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya hukum kepailitan, hukum industri, hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di Negara lain.
- d) Penerimaan Tunai Atas Piutang Yang Telah Dihapusbukukan
Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata dikemudian hari diterima pembayaran/pelunasan, maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau pembiayaan tergantung dari jenis piutang.
- e) Restrukturisasi
Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang meliputi pemberian keringanan hutang, persetujuan angsuran atau persetujuan penundaan pembayaran.

4.3.7. Pengukuran Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara Periodik. Pengukuran persediaan pada saat periode Penyusunan Laporan Keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventaris dengan menggunakan harga terakhir pada Dinas Kesehatan menggunakan harga perolehan.

Pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi sebesar jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit biaya perolehannya. Dalam hal terjadi selisih antara catatan persediaan dan hasil stock opname yang disebabkan karena persediaan usang, kadaluarsa atau rusak maka selisih persediaan dapat diperlakukan sebagai beban, sedangkan jika dikarenakan persediaan hilang maka selisih persediaan dapat diperlakukan sebagai kerugian daerah.

Persediaan disajikan sebesar:

1) Biaya perolehan apabila Diperoleh dengan Pembelian

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

2) Harga pokok produksi apabila Diperoleh dengan Memproduksi Sendiri

Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.

3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan

Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

4.3.8. Pengukuran Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalty atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

1) Pengukuran Investasi dilakukan berdasarkan:

a) Dicatat Sebesar Nilai Perolehan

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga misalnya saham dan obligasi jangka pendek dicatat sebesar biaya perolehannya

meliputi harga transaksi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga investasi itu sendiri ditambah biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah adalah sebesar biaya perolehannya.

b) Dicatat Sebesar Nilai Wajar

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah adalah sebesar nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal nilai perolehannya yaitu sebesar harga pasar.

c) Dicatat Sebesar Nilai Nominal

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

d) Dicatat Sebesar Nilai Tercatat atau Nilai Wajar Lainnya

Investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal diproyek-proyek pembangunan Pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

2) Penilaian Investasi Pemerintah daerah dilakukan dengan 3 metode yaitu:

a) Metode Biaya

Metode Biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi sebesar biaya perolehan. Metode ini digunakan pada investasi dengan kepemilikan kurang 20%.

b) Metode Ekuitas

Metode Ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari Badan Usaha Penerima Investasi yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. Metode ini digunakan pada kepemilikan lebih dari 20% atau kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh signifikan.

c) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan

Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan (*Net Realizable Value*) digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah bersifat Non Permanen-Dana bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik, dilakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga nilai dana bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Penyajian dana bergulir di neraca dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

4.3.9. Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai Aset Tetap diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung

termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua sewa lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

- 3) Kapitalisasi Aset, Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap digunakan untuk menentukan nilai perolehan minimum suatu aset yang harus dikapitalisasi.

4.3.10 Penyusutan Aset Tetap

Aset Tetap merupakan komponen aset operasi Pemerintah yang penting dalam menjalankan operasional pemerintah. Aset tetap memiliki sifat yang rentan terhadap penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan dan pemanfaatnya. Oleh karena itu informasi tentang nilai aset tetap harus disajikan secara memadai agar dapat digunakan untuk pengembalian keputusan dalam pengelolaan aset. Salah satu informasi yang sangat dibutuhkan dalam pengembalian keputusan yang terkait dalam pengelolaan aset tetap adalah nilai wajar aset. Penyajian wajar atas nilai aset tetap dapat dipenuhi melalui penetapan kebijakan penyusutan.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan Depreciable assets selama masa manfaat aset yang bersangkutan dan masih dipergunakan.

Nilai penyusutan untuk masing masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus /straight line method dihitung masing-masing sesuai realisasi belanja tahun pengeluaran dimulai pada tahun pengeluaran +1.

4.3.11. Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan, yang meliputi:

1. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
2. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan umumnya dan dapat dialokasikan kekonstruksi tersebut; dan

3. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

4.3.12. Pengukuran Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan yang memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis bagi pemerintah daerah kerana mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial potential service di masa depan.

Aset lainnya dibagi dalam empat kelompok yaitu :

1. Tagihan Jangka Panjang.
 - a. Tagihan Penjualan Angsuran, diukur sebesar nilai nominal dari kontrak/ berita acara penjualan aset yang bersangkutan
 - b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian daerah, diukur sebesar Nilai Nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah
2. Kemitraan dengan pihak ketiga
 - a. Sewa, diukur sebesar nilai nominal dari kontrak / berita secara sewa aset yang bersangkutan.
 - b. Kerjasama Pemanfaatan KSP, diukur sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian.
 - c. Bangunan Guna Serah /BOT, diukur sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga /investor untuk membangun set tersebut. yang tercatat.
 - d. Bangunan serah guna /BTO, diukur sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
3. Aset Tidak Berwujud (ATB)

ATB diukur dengan harga perolehannya. Terhadap ATB dilakukan amortisasi kecuali atas ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaat. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode dengan metode garis lurus. Untuk ATB berupa piranti lunak Software jika tidak diketahui adanya masa manfaat terkait masa operasionalnya, maka masa manfaatnya ditetapkan selama 5 tahun.

4. Aset Lain lain, adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasikan kedalam aset lain lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

4.3.13. Pengukuran Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Perlakuan akuntansi terhadap akun kewajiban adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Kewajiban yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar/kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
2. Biaya perolehan atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaiannya dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut, Penggunaan Nilai Nominal dalam nilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.
3. Akun Kewajiban diklasifikasikan menjadi:
 - a. Kewajiban jangka pendek, merupakan utang yang harus dibayar kembali/jatuh tempo dalam suatu periode akuntansi, meliputi bagian lancar utang jangka panjang, utang kepada pihak ketiga, utang bunga dan utang perhitungan pihak ketiga.
 - b. Kewajiban jangka panjang, merupakan utang yang harus dibayar kembali/ jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi, meliputi pinjaman utang perbankan dan utang jangka panjang lainnya.

4.3.14. Pengukuran Ekuitas

Akun ini terdiri dari :

1. Ekuitas

Ekuitas adalah Kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah daerah. Saldo Ekuitas pada tanggal laporan berasal dari Ekuitas awal ditambah /dikurang oleh

Surplus/Depisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset tetap, dan lain-lain.

2. Ekuitas SAL

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup Antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus /Depisit –LRA.

3. Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan

Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat reciprocal account untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup Rekening Koran PPKD/SKPD.

4.3.15. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP

Koreksi Kesalahan

Koreksi Kesalahan atas penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kesalahan tidak berulang

a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan

Kesalahan jenis ini, dilakukan dengan melakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.

b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

Apabila kesalahan terjadi pada periode sebelumnya namun belum diterbitkan laporan keuangan, maka cukup dilakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan, akan tetapi, jika kesalahan baru ditemukan setelah diterbitkan laporan keuangan, maka perlakuannya adalah sebagai berikut:

- Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja yang mengakibatkan penambahan kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan lain-lain LRA. Sedangkan apabila mengakibatkan pengurangan kas, maka dilakukan pembetulan pada akun Saldo Anggaran lebih.
- Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan baik menambah atau mengurangi posisi kas, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Ekuitas.

2. Kesalahan Berulang

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah/ normal dari jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Kesalahan jenis ini tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA, maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

4.3.16. Penyajian Kembali (Restatement)

Laporan keuangan entitas pelaporan harus dapat dibandingkan dari waktu ke waktu untuk mengetahui kecenderungan arah trend posisi keuangan, Kinerja dan arus kas. Oleh karena itu kebijakan akuntansi yang diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Apabila terdapat perubahan didalam perlakuan, pengakuan atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode dan estimasi, maka perubahan kebijakan akuntansi disajikan pada laporan keuangan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Terkait penyajian laporan keuangan pemerintah daerah terdapat dua hal pokok dalam tahapan pelaksanaannya yaitu:

1. Melakukan perhitungan ulang terhadap akun yang mengalami perubahan untuk menentukan nilai buku pada periode pembenahan sesuai perubahan kebijakan akuntansi
2. Menyajikan Laporan keuangan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang baru untuk semua periode yang dilaporkan dan mengungkapkan perbedaan yang terjadi antara laporan keuangan baru dibandingkan dengan laporan keuangan yang telah diterbitkan sebelumnya.

BAB V

PENJELASAN

POS-POS LAPORAN

KEUANGAN



5.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran merupakan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya pada satu tahun anggaran, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

5.1.1 Pendapatan

31 Desember 2018	31 Desember 2017
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

5.1.2 Belanja

31 Desember 2018	31 Desember 2017
(Rp)	(Rp)
10.932.014.625,81	11.004.082.610,00

Tabel 5.1. Anggaran dan Realisasi Belanja tahun 2018 dan 2017

No	Uraian	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	%	Realisasi TA 2017 (Rp)
1	Belanja Operasional	6.415.784.400,00	5.875.262.648,00	91,58	6.876.878.681,00
2	Belanja Modal	5.263.877.880,00	5.058.751.977,81	96,10	4.127.203.929,00
3	Belanja Tidak Terduga	-			0,00
TOTAL		11.679.662.280,00	10.932.014.625,81	93,62	11.004.082.610,00

5.1.2.1 Belanja Operasional

31 Desember 2018	31 Desember 2017
(Rp)	(Rp)
5.873.262.648,00	6.876.878.681,00

Tabel 5.2. Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

No	Uraian	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	3.328.081.030,00	3.160.981.906,00	94,98
2	Belanja Barang dan Jasa	3.087.703.370,00	2.712.280.742,00	87,84
3	Hibah			
4	Bantuan Sosial			
5	Bantuan Keuangan			
TOTAL		6.415.784.400,00	5.873.262.648,00	91,54

Rincian masing-masing jenis Belanja Operasi tersebut diuraikan sebagai berikut:

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Tabel 5.3. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

No	Uraian	Anggaran TA 2018	Realisasi TA 2018	%
		(Rp)	(Rp)	
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.944.481.030,00	1.875.090.997,00	96,43
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.383.600.000,00	1.285.890.909,00	92,94
3	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.328.081.030,00	3.160.981.906,00	94,98

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Tabel 5.4. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian	Anggaran TA 2018	Realisasi TA 2018	%
		(Rp)	(Rp)	
1	Belanja Bahan Pakai Habis	258.259.975,00	251.707.881,00	97,46
2	Belanja Jasa Kantor	1.137.023.200,00	1.007.090.303,00	88,57
3	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	48.787.500,00	20.355.300,00	41,72
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	133.500.900,00	127.322.550,00	95,37
5	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
6	Belanja Makanan dan Minuman	319.739.000,00	262.655.500,00	82,15
7	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	11.500.000,00	11.500.000,00	100,00
8	Belanja Perjalanan Dinas	392.726.745,00	345.969.658,00	88,09

9	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	90.000.000,00	54.700.000,00	60,78
10	Belanja Pemeliharaan	270.136.050,00	250.649.550,00	92,79
11	Belanja Honorarium PNS dan Non PNS	119.550.000,00	87.900.000,00	73,53
12	Belanja Honorarium non PNS	294.480.000,00	280.430.000,00	95,23
TOTAL		3.087.703.370,00	2.712.280.742,00	87,84

5.1.2.1.3 Belanja Hibah

Tabel 5.5. Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah

No	Uraian	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	%
1	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Tabel 5.6. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial

No	Uraian	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	%
1	Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

Tabel 5.7. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan

No	Uraian	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	%
1	Belanja Bantuan kepada Partai Politik	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

5.1.2.2 Belanja Modal

31 Desember 2018

31 Desember 2017

(Rp)

(Rp)

5.058.751.977,81

4.127.203.929,00

Tabel 5.8. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

No	Uraian	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	%
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	600.000,00	401.700,00	66,95
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Ukur	5.000.000,00	4.734.500,00	94,69
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	2.750.000,00	1.870.000,00	68,00
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Kantor	399.742.000,00	381.502.500,00	95,44
5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Rumah Tangga	13.660.000,00	3.815.900,00	27,93
6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Komputer	996.800.000,00	940.663.380,00	94,37
7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Peralatan Alat Studio	10.750.000,00	8.100.000,00	75,35
8	Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	9.517.000,00	9.517.000,00	100,00
9	Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.825.058.880,00	3.708.146.997,81	96,94
10	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.263.877.880,00	5.058.751.977,81	96,10

5.1.2.2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Tabel 5.9. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	%
1	Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja	600.000,00	401.700,00	66,95
2	Pengadaan Universal Tester	5.000.000,00	4.734.500,00	94,69
3	Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	2.750.000,00	1.870.000,00	68,00
4	Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	32.982.000,00	31.150.000,00	94,45
5	Pengadaan Alat Kantor Lainnya	366.760.000,00	350.352.500,00	95,53
6	Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	13.660.000,00	3.815.900,00	27,93
7	Pengadaan Personal Komputer	31.900.000,00	31.387.800,00	98,39
8	Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	369.970.000,00	333.000.560,00	90,01
9	Pengadaan Peralatan Mini Komputer	8.000.000,00	6.098.000,00	76,23
10	Pengadaan Peralatan Personal Komputer	29.350.000,00	16.048.000,00	54,68
11	Pengadaan Peralatan Jaringan	557.580.000,00	554.129.020,00	99,38
12	Pengadaan Peralatan Studio Visual	10.750.000,00	8.100.000,00	75,35
13	Pengadaan Alat Bantu Keamanan	9.517.000,00	9.517.000,00	100,00
TOTAL		1.438.819.000,00	1.350.604.980,00	

5.1.2.2.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Tabel 5.10 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	%
1	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.825.058.88,00	3.708.146.997,81	96,94
TOTAL		3.825.058.880,00	3.708.146.997,81	96,94

5.1.2.2.3 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Tabel 5.11 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	%
1	Pengadaan Jaringan Distribusi	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

5.1.2.2.4 Belanja Modal Aset Lain-Lain

Tabel 5.12. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	%
1	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Surplus/Defisit LRA

31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
(10.932.014.625,81)	(11.004.082.610,00)

5.1.3 Pembiayaan Netto

31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
0,00	0,00

Tabel 5.13. Rincian Anggaran dan Realisasi Surplus/Defisit LRA

No	Uraian	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	%	Realisasi TA 2017 (Rp)
1	Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja	(11.679.662.280,00)	(10.932.014.625,81)	93,60	(11.004.082.610,00)
Surplus/Defisit		(11.697.662.280,00)	(10.932.014.625,81)	93,60	(11.004.082.610,00)

5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan

Tabel 5.14. Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan

No	Uraian	Anggaran TA 2018	Realisasi TA 2018	%
		(Rp)	(Rp)	
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	0,00	0,00
2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Tabel 5.15. Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan

No	Uraian	Anggaran TA 2018	Realisasi TA 2018	%
		(Rp)	(Rp)	
1	Penyertaan Modal pada Bank	0,00	0,00	0,00
2	Penyertaan Modal pada PDAM	0,00	0,00	0,00
3	Penyertaan Modal pada Bangun Banua	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

5.1.3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)

31 Desember 2018

31 Desember 2017

(Rp)

(Rp)

(10.932,014.625,81)

(11.004.082.610)

Tabel 5.16 Rincian Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan

No	Uraian	Anggaran TA 2018 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)	%	Realisasi TA 2017 (Rp)
1	Pendapatan	0	0	0	0
2	Belanja	11.679.662.280,00	10.932.014.625,81	93,60	11.004.082.610,00
3	Surplus (Defisit)	(11.679.662.280)	(10.932.014.625,81)	93,60	(11.004.082.610,00)
4	Pembiayaan Netto				0
SILPA					(11.004.082.610,00)

5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

5.2.1 Saldo Anggaran lebih Awal

31 Desember 2018	31 Desember 2017
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

31 Desember 2018	31 Desember 2017
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

5.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

31 Desember 2018	31 Desember 2017
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

5.2.4 Saldo Anggaran Lebih Akhir

31 Desember 2018	31 Desember 2017
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

5.3 Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru atas aset, kewajiban, dan ekuitas per tanggal 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017. Aset Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 8.808.456.548,16 dan Rp 4.165.399.224,83.

Posisi keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru pada tahun 2017 adalah Rp 4.134.860.296,26.

Penjelasan pos-pos neraca adalah sbb :

5.3.1 Aset Lancar

31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
<u>67.884.918,00</u>	<u>6.813.000,00</u>

5.3.1.1 Kas di Kas Daerah

31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

5.3.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
<u>67.368.819,00</u>	<u>6.195.000,00</u>

Cat : Bukti setor ke Kas Daerah Terlampir

5.3.1.3 Kas Di Bendahara Penerimaan

31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

5.3.1.4 Kas Di Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional

31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

5.3.1.5 Kas Di Bendahara Badan Layanan Umum Daerah

31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

5.3.1.6 Kas Lain-lain

31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

5.3.1.7 Investasi Jangka Pendek

31 Desember 2018	31 Desember 2017
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

5.3.1.8 Piutang Pajak

31 Desember 2018	31 Desember 2017
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

5.3.1.9 Penyisihan Piutang Pajak

31 Desember 2018	31 Desember 2017
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

5.3.1.10 Piutang Retribusi

31 Desember 2018	31 Desember 2017
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

5.3.1.11 Penyisihan Piutang Retribusi

31 Desember 2018	31 Desember 2017
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

5.3.1.12 Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya

31 Desember 2018	31 Desember 2017
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

5.3.1.13 Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya yang Sah

31 Desember 2018	31 Desember 2017
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

5.3.1.14 Piutang Bagi Hasil Provinsi

31 Desember 2018	31 Desember 2017
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

5.3.1.15 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

31 Desember 2018	31 Desember 2017
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

5.3.1.16 Belanja Dibayar Dimuka

31 Desember 2018	31 Desember 2017
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

5.3.1.17 Persediaan

31 Desember 2018	31 Desember 2017
(Rp)	(Rp)
516.000,00	618.000,00

5.3.2 Investasi Jangka Panjang

31 Desember 2018	31 Desember 2017
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

5.3.2.1 Investasi Non Permanen

31 Desember 2018	31 Desember 2017
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

5.3.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen (Penyertaan Modal Pemerintah Daerah)

31 Desember 2018	31 Desember 2017
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

5.3.3 Aset Tetap

31 Desember 2018
(Rp)
8.735.491.630,16

31 Desember 2017
(Rp)
4.126.607.296,26

Tabel 5.17 Komponen Aset tetap Tahun 2018

Komponen Aset Tetap	Tahun 2018	Tahun 2017
Tanah	493.200.000,00	0,00
Peralatan dan Mesin	6.777.273.885,25	5.670.656.108,16
Gedung dan Bangunan	4.375.464.422,23	0,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	66.020.000,00	66.020.000,00
Aset Tetap Lainnya	484.160.000,00	424.980.000,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Ak. Penyusutan	(3.460.626.677,32)	(2.035.048.811,90)
Aset Tetap	8.735.491.630,16	4.126.607.296,26

Tabel 5.18 Perbandingan Aset Tetap Tahun 2018 dan 2017

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017	Kenaikan / Penurunan	
			Rp	%
Tanah	493.200.000,00	0,00	493.200.000,00	0,00
Peralatan dan Mesin	6.777.273.885,25	5.670.656.108,16	1.106.617.777,09	83,67
Gedung dan Bangunan	4.375.464.422,23	0,00	4.375.464.422,23	0,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	66.020.000,00	66.020.000,00	-	100,00
Aset Tetap Lainnya	484.160.000,00	424.980.000,00	59.180.000,00	87,78
Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-	-
Ak. Penyusutan	(3.460.626.677,32)	(2.035.048.811,90)	(1.425.577.865,42)	58,81
Jumlah Aset Tetap	8.735.491.630,16	4.126.607.296,26	4.608.884.333,90	47,24

5.3.3.1 Tanah

31 Desember 2018
(Rp)
493.200.000,00

31 Desember 2017
(Rp)
0,00

5.3.3.2 Peralatan dan Mesin

31 Desember 2018
(Rp)

6.777.273.885,25

31 Desember 2017
(Rp)

5.670.656.108,16

Tabel 5.19 Rincian Peralatan dan Mesin

No	URAIAN PERALATAN DAN MESIN	TAHUN 2018	TAHUN 2017
1	Mutasi Tambah Karena Perubahan SKPD	5.670.656.108,16	1.415.430.512,39
2	Belanja Modal	1.350.604.980,00	3.969.283.929,00
3	Belanja Barang Jasa	2.700.000,00	0,00
4	Mutasi Tambah Antar SKPD	173.844.500,00	418.072.450,00
5	Non Aset	0,00	(11.298.000,00)
6	Ekstra	(95.691.974,62)	(69.922.783,23)
7	Penghapusan	(251.259.728,29)	0,00
8	Reklas Antar KIB	(73.580.000,00)	(50.910.000,00)
TOTAL		6.777.273.885,25	5.670.656.108,16

A. Penambahan Atas Saldo Aset Tetap-Peralatan dan Mesin Tahun 2018 sebesar Rp 1.527.149.480,00

a. Penambahan Aset karena Perubahan SKPD Tahun 2018 sebesar Rp 5.670.656.108,16

Tabel 5.20 Penambahan Aset Karena Perubahan SKPD

No	Tahun	Harga Satuan	Jumlah
1.	Sepeda Motor	9.600.000,00	9.600.000,00
2.	Sepeda Motor	6.000.000,00	6.000.000,00
3.	Sepeda Motor	19.577.850,00	19.577.850,00
4.	Global Positioning System (GPS)	5.570.000,00	5.570.000,00
5.	Global Positioning System (GPS)	3.250.000,00	3.250.000,00
6.	AC Split	4.500.000,00	4.500.000,00
7.	AC Split	2.850.000,00	2.850.000,00
8.	AC Split	3.025.000,00	3.025.000,00
9.	AC Split	4.500.000,00	4.500.000,00
10.	AC Split	4.500.000,00	4.500.000,00
11.	AC Split	7.500.000,00	7.500.000,00
12.	AC Split	6.000.000,00	6.000.000,00
13.	AC Split	3.450.000,00	3.450.000,00
14.	Kipas Angin	1.500.000,00	1.500.000,00
15.	Camera Video	1.525.000,00	1.525.000,00
16.	Alat Pemadam Portable	1.400.000,00	1.400.000,00
17.	Note Book	4.900.000,00	4.900.000,00

18	Scanner	1.248.700,00	1.248.700,00
19	Peralatan Jaringan Lain-lain	34.900.000,00	34.900.000,00
20	Peralatan Jaringan Lain-lain	6.080.400,00	6.080.400,00
21	Peralatan Jaringan Lain-lain	14.000.000,00	14.000.000,00
22	Peralatan Jaringan Lain-lain	4.400.000,00	4.400.000,00
23	Peralatan Jaringan Lain-lain	2.800.000,00	2.800.000,00
24	Peralatan Jaringan Lain-lain	3.080.000,00	3.080.000,00
25	Peralatan Jaringan Lain-lain	1.250.000,00	1.250.000,00
26	Peralatan Jaringan Lain-lain	1.400.000,00	1.400.000,00
27	Lensa Kamera	9.700.000,00	9.700.000,00
28	Gordyn	8.000.000,00	8.000.000,00
29	AC Split	4.500.000,00	4.500.000,00
30	AC Split	6.450.000,00	6.450.000,00
31	AC Split	4.500.000,00	4.500.000,00
32	AC Split	4.500.000,00	4.500.000,00
33	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	2.700.000,00	2.700.000,00
34	UPS	15.400.000,00	15.400.000,00
35	Router	14.900.000,00	14.900.000,00
36	Peralatan Jaringan Lain-lain	49.800.000,00	49.800.000,00
37	Peralatan Jaringan Lain-lain	28.500.000,00	28.500.000,00
38	Radio Access Point	11.800.000,00	11.800.000,00
39	Antene	10.000.000,00	10.000.000,00
40	Antene	2.000.000,00	2.000.000,00
41	Switch Hub	29.500.000,00	29.500.000,00
42	Peralatan studio Visual Lain-lain	20.750.000,00	20.750.000,00
43	Kabel Listril	2.500.000,00	2.500.000,00
44	CCTV	14.420.000,00	14.420.000,00
45	CCTV	88.000.000,00	88.000.000,00
46	Global Positioning System (GPS)	9.500.000,00	9.500.000,00
47	Sofa	8.722.384,00	8.722.384,00
48	AC Split	6.000.000,00	6.000.000,00
49	Televisi	7.000.000,00	7.000.000,00
50	Camera Video	7.400.000,00	7.400.000,00
51	Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain	19.900.000,00	19.900.000,00
52	Server	50.350.000,00	50.350.000,00
53	Audio Cassete Recorder	2.200.000,00	2.200.000,00
54	Printer	3.000.000,00	3.000.000,00
55	CCTV	90.495.000,00	90.495.000,00
56	Peralatan Listrik	8.750.000,00	8.750.000,00
57	Tool Kit Boks	2.000.000,00	2.000.000,00
58	Meja Rapat	3.300.000,00	3.300.000,00
59	Meja Rapat	3.300.000,00	3.300.000,00
60	Meja Rapat	3.300.000,00	3.300.000,00
61	Meja Rapat	3.300.000,00	3.300.000,00
62	Meja Rapat	3.300.000,00	3.300.000,00
63	Meja Rapat	3.300.000,00	3.300.000,00
64	Kursi Rapat	1.929.642,00	1.929.642,00
65	Kursi Rapat	1.929.642,00	1.929.642,00

66	Kursi Rapat	1.929.642,00	1.929.642,00
67	Kursi Rapat	1.929.642,00	1.929.642,00
68	Kursi Rapat	1.929.642,00	1.929.642,00
69	Kursi Rapat	1.929.642,00	1.929.642,00
70	Kursi Rapat	1.929.642,00	1.929.642,00
71	Kursi Rapat	1.929.642,00	1.929.642,00
72	Kursi Rapat	1.929.642,00	1.929.642,00
73	Kursi Rapat	1.929.642,00	1.929.642,00
74	Kursi Rapat	1.929.642,00	1.929.642,00
75	Kursi Rapat	1.929.642,00	1.929.642,00
76	Kursi Rapat	1.929.642,00	1.929.642,00
77	Kursi Rapat	1.929.654,00	1.929.654,00
78	AC Split	3.525.000,00	3.525.000,00
79	AC Split	3.525.000,00	3.525.000,00
80	Camera Film	3.000.000,00	3.000.000,00
81	P.C Unit/ Komputer PC	8.425.000,00	8.425.000,00
82	P.C Unit/ Komputer PC	8.475.000,00	8.475.000,00
83	P.C Unit/ Komputer PC	8.475.000,00	8.475.000,00
84	Lap Top	8.250.000,00	8.250.000,00
85	Lap Top	12.487.500,00	12.487.500,00
86	Printer	1.466.666,00	1.466.666,00
87	Printer	1.485.000,00	1.485.000,00
88	UPS	19.808.000,00	19.808.000,00
89	UPS	7.450.000,00	7.450.000,00
90	Harddisk Internal	7.500.000,00	7.500.000,00
91	Harddisk Internal	7.500.000,00	7.500.000,00
92	Harddisk Internal	7.500.000,00	7.500.000,00
93	Harddisk Eksternal	1.400.000,00	1.400.000,00
94	Memory	3.750.000,00	3.750.000,00
95	Memory	3.750.000,00	3.750.000,00
96	Memory	3.750.000,00	3.750.000,00
97	Server	25.050.000,00	25.050.000,00
98	Server	50.200.000,00	50.200.000,00
99	Server	85.000.000,00	85.000.000,00
100	Router	4.955.000,00	4.955.000,00
101	Router	8.800.000,00	8.800.000,00
102	Router	25.000.000,00	25.000.000,00
103	Peralatan Jaringan Lain-lain	2.090.000,00	2.090.000,00
104	Switch Hub	1.242.000,00	1.242.000,00
105	Switch Hub	5.000.000,00	5.000.000,00
106	Switch Hub	5.000.000,00	5.000.000,00
107	Wireless Access Point	1.929.125,00	1.929.125,00
108	Wireless Access Point	1.929.125,00	1.929.125,00
109	Kursi Tamu di Ruang Pejabat Lain-lain	4.000.000,00	4.000.000,00
110	Clearing Instalation	10.600.000,00	10.600.000,00
111	Televisi	4.359.626,73	17.438.506,92
112	P.C Unit/ Komputer PC	6.776.736,24	6.776.736,24
113	P.C Unit/ Komputer PC	6.776.736,24	6.776.736,24
114	P.C Unit/ Komputer PC	6.776.736,24	6.776.736,24

115	P.C Unit/ Komputer PC	6.776.736,24	6.776.736,24
116	P.C Unit/ Komputer PC	6.776.736,24	6.776.736,24
117	P.C Unit/ Komputer PC	6.776.736,24	6.776.736,24
118	P.C Unit/ Komputer PC	6.776.736,24	6.776.736,24
119	UPS	2.538.516,83	2.538.516,83
120	UPS	2.538.516,83	2.538.516,83
121	UPS	2.538.516,83	2.538.516,83
122	UPS	2.538.516,83	2.538.516,83
123	UPS	2.538.516,83	2.538.516,83
124	UPS	2.538.516,83	2.538.516,83
125	UPS	2.538.516,83	2.538.516,83
126	Server	57.944.405,94	57.944.405,94
127	CCTV	9.878.141,60	9.878.141,60
128	Alat Pengaman (Sinyal)	5.711.488,01	5.711.488,01
129	Alat Pengaman (Sinyal)	5.711.488,01	5.711.488,01
130	Meja Panjang	41.921.212,94	41.921.212,94
131	Kursi Putar	1.996.248,24	1.996.248,24
132	Kursi Putar	1.996.248,24	1.996.248,24
133	Kursi Putar	1.996.248,24	1.996.248,24
134	Loudspeaker	7.097.771,51	7.097.771,51
135	Sound System	7.541.382,23	7.541.382,23
136	P.C Unit/ Komputer PC	8.450.000,00	8.450.000,00
137	P.C Unit/ Komputer PC	8.450.000,00	8.450.000,00
138	P.C Unit/ Komputer PC	8.450.000,00	8.450.000,00
139	P.C Unit/ Komputer PC	8.450.000,00	8.450.000,00
140	P.C Unit/ Komputer PC	8.450.000,00	8.450.000,00
141	P.C Unit/ Komputer PC	8.450.000,00	8.450.000,00
142	P.C Unit/ Komputer PC	8.450.000,00	8.450.000,00
143	P.C Unit/ Komputer PC	8.450.000,00	8.450.000,00
144	UPS	1.940.796,90	1.940.796,90
145	UPS	1.940.796,90	1.940.796,90
146	UPS	1.940.796,90	1.940.796,90
147	UPS	1.900.000,00	1.900.000,00
148	UPS	1.900.000,00	1.900.000,00
149	UPS	1.900.000,00	1.900.000,00
150	UPS	1.900.000,00	1.900.000,00
151	UPS	1.900.000,00	1.900.000,00
152	UPS	1.900.000,00	1.900.000,00
153	UPS	1.900.000,00	1.900.000,00
154	UPS	1.900.000,00	1.900.000,00
155	UPS	1.900.000,00	1.900.000,00
156	Stabilizer/Stavolt	2.772.567,00	2.772.567,00
157	Power Supply Microphone	7.097.771,51	7.097.771,51
158	Facsimile	2.500.000,00	2.500.000,00
159	Sepeda Motor	6.600.000,00	6.600.000,00
160	Sepeda Motor	7.800.000,00	7.800.000,00
161	Sepeda Motor	7.800.000,00	7.800.000,00
162	Sepeda Motor	9.000.000,00	9.000.000,00
163	Sepeda Motor	13.800.000,00	13.800.000,00
164	Staion Wagon	159.299.950,00	159.299.950,00

165	Staion Wagon	213.772.500,00	213.772.500,00
166	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lain-lain	20.991.725,00	20.991.725,00
167	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lain-lain	20.991.725,00	20.991.725,00
168	Alat Penyimpanan Lain-Lain	7.459.350,00	7.459.350,00
169	Lemari Besi	2.700.000,00	2.700.000,00
170	Lemari Besi	2.700.000,00	2.700.000,00
171	Lemari Besi	2.700.000,00	2.700.000,00
172	Filling Besi/Metal	2.450.000,00	2.450.000,00
173	Filling Besi/Metal	2.450.000,00	2.450.000,00
174	Filling Besi/Metal	2.450.000,00	2.450.000,00
175	Filling Besi/Metal	2.450.000,00	2.450.000,00
176	Lemari Kaca	2.850.000,00	2.850.000,00
177	Meja Absensi	7.500.000,00	7.500.000,00
178	Meja Kayu/Rotan	14.950.000,00	14.950.000,00
179	Meja Reseption	3.225.731,38	3.225.731,38
180	Meja Tambahan	1.654.221,22	1.654.221,22
181	Meja Tambahan	1.654.221,22	1.654.221,22
182	Meja Bundar	2.150.487,58	2.150.487,58
183	Meja Bundar	2.150.487,58	2.150.487,58
184	Kursi Kerja	1.040.154,25	1.040.154,25
185	AC Unit	4.300.000,00	4.300.000,00
186	Alat Pendingin Lain-lain	6.150.000,00	6.150.000,00
187	Alat Pendingin Lain-lain	12.300.000,00	12.300.000,00
188	Radio	5.950.000,00	5.950.000,00
189	Televisi	14.000.000,00	14.000.000,00
190	Sound System	7.444.500,00	7.444.500,00
191	Wireless	13.074.144,49	13.074.144,49
192	Microphone	2.011.406,84	2.011.406,84
193	Camera Film	8.534.373,00	8.534.373,00
194	Camera Film	8.534.373,00	8.534.373,00
195	Tangga Aluminium	3.000.000,00	3.000.000,00
196	Tandon Air	1.461.075,00	1.461.075,00
197	P.C Unit/Komputer PC	8.650.000,00	8.650.000,00
198	P.C Unit/Komputer PC	12.067.048,00	12.067.048,00
199	P.C Unit/Komputer PC	12.067.048,00	12.067.048,00
200	P.C Unit/Komputer PC	12.067.048,00	12.067.048,00
201	Laptop	22.199.548,00	22.199.548,00
202	Laptop	22.199.548,00	22.199.548,00
203	Laptop	22.199.548,00	22.199.548,00
204	Laptop	22.199.548,00	22.199.548,00
205	Laptop	22.199.548,00	22.199.548,00
206	Laptop	12.067.048,00	12.067.048,00
207	Laptop	12.067.048,00	12.067.048,00
208	Laptop	12.067.048,00	12.067.048,00
209	Laptop	12.067.048,00	12.067.048,00
210	Laptop	22.313.527,00	22.313.527,00
211	Laptop	24.444.836,00	24.444.836,00
212	Laptop	10.257.998,00	10.257.998,00

213	Laptop	10.257.998,00	10.257.998,00
214	Laptop	16.817.550,00	16.817.550,00
215	Laptop	16.817.550,00	16.817.550,00
216	Laptop	16.817.550,00	16.817.550,00
217	Laptop	16.817.550,00	16.817.550,00
218	Laptop	14.520.000,00	14.520.000,00
219	Laptop	10.491.587,13	10.491.587,13
220	Note Book	15.758.801,00	15.758.801,00
221	Note Book	15.670.261,00	15.670.261,00
222	Printer	2.356.320,00	2.356.320,00
223	Printer	2.460.000,00	2.460.000,00
224	Printer	2.460.000,00	2.460.000,00
225	Printer	5.703.523,00	5.703.523,00
226	Printer	5.703.523,00	5.703.523,00
227	Printer	5.703.523,00	5.703.523,00
228	Printer	1.816.410,87	1.816.410,87
229	UPS	37.101.477,51	37.101.477,51
230	Memory	7.500.000,00	7.500.000,00
231	Memory	7.500.000,00	7.500.000,00
232	Memory	7.500.000,00	7.500.000,00
233	Memory	7.500.000,00	7.500.000,00
234	Power Supply	2.200.000,00	2.200.000,00
235	Router	19.145.248,00	19.145.248,00
236	Peralatan Jaringan Lain-lain	15.840.000,00	15.840.000,00
237	Peralatan Jaringan Lain-lain	12.100.000,00	12.100.000,00
238	Peralatan Jaringan Lain-lain	8.250.000,00	8.250.000,00
239	Peralatan Jaringan Lain-lain	6.600.000,00	6.600.000,00
240	Peralatan Jaringan Lain-lain	4.798.200,00	4.798.200,00
241	Peralatan Jaringan Lain-lain	2.705.913.400,00	2.705.913.400,00
242	Switch Hub	3.000.000,00	3.000.000,00
243	Wireless Access Point	1.628.185,00	1.628.185,00
244	Wireless Access Point	1.628.185,00	1.628.185,00
245	Meja Kerja Pejabat Eselon II	8.246.042,14	8.246.042,14
246	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2.205.628,29	2.205.628,29
247	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2.205.628,29	2.205.628,29
248	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2.205.628,29	2.205.628,29
249	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2.205.628,29	2.205.628,29
250	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1.102.814,15	1.102.814,15
251	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1.102.814,15	1.102.814,15
252	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1.102.814,15	1.102.814,15
253	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1.102.814,15	1.102.814,15
254	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1.102.814,15	1.102.814,15
255	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1.102.814,15	1.102.814,15
256	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1.102.814,15	1.102.814,15
257	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1.102.814,15	1.102.814,15
258	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1.102.814,15	1.102.814,15
259	Meja Kerja	2.430.834,46	2.430.834,46
260	Meja Kerja	2.430.834,46	2.430.834,46
261	Meja Kerja	2.430.834,46	2.430.834,46

262	Meja Kerja	2.430.834,46	2.430.834,46
263	Meja Kerja	2.430.834,46	2.430.834,46
264	Meja Kerja	2.430.834,46	2.430.834,46
265	Meja Kerja	4.245.834,46	4.245.834,46
266	Meja Kerja	2.760.834,46	2.760.834,46
267	Meja Kerja	2.760.834,46	2.760.834,46
268	Meja Kerja	2.760.834,46	2.760.834,46
269	Meja Kerja	2.760.834,46	2.760.834,46
270	Meja Kerja	2.210.834,46	2.210.834,46
271	Meja Kerja	2.595.834,46	2.595.834,46
272	Meja Kerja	2.595.834,46	2.595.834,46
273	Meja Kerja	2.595.834,46	2.595.834,46
274	Meja Kerja	2.595.834,46	2.595.834,46
275	Meja Kerja	2.078.834,46	2.078.834,46
276	Meja Kerja	2.760.834,46	2.760.834,46
277	Meja Kerja	2.760.834,46	2.760.834,46
278	Meja Kerja	2.760.834,46	2.760.834,46
279	Meja Kerja	2.760.834,46	2.760.834,46
280	Meja Kerja	2.760.834,46	2.760.834,46
281	Meja Kerja	2.760.834,46	2.760.834,46
282	Meja Kerja	2.760.834,46	2.760.834,46
283	Meja Kerja	2.760.834,46	2.760.834,46
284	Meja Kerja	2.760.834,46	2.760.834,46
285	Meja Kerja	1.660.834,46	1.660.834,46
286	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	4.411.256,58	4.411.256,58
287	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3.308.442,44	3.308.442,44
288	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3.308.442,44	3.308.442,44
289	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3.308.442,44	3.308.442,44
290	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3.308.442,44	3.308.442,44
291	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2.205.628,29	2.205.628,29
292	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2.205.628,29	2.205.628,29
293	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2.205.628,29	2.205.628,29
294	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2.205.628,29	2.205.628,29
295	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2.205.628,29	2.205.628,29
296	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2.205.628,29	2.205.628,29
297	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2.205.628,29	2.205.628,29
298	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2.205.628,29	2.205.628,29
299	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2.205.628,29	2.205.628,29
300	Layar Proyektor	6.465.657,00	6.465.657,00
301	Peralatan Studio Video dan Film Lain-lain	46.200.000,00	46.200.000,00
302	Peralatan Studio Video dan Film Lain-lain	46.200.000,00	46.200.000,00
303	Film Projector	8.000.000,00	8.000.000,00
304	Camera Film	32.102.053,23	32.102.053,23
305	Lensa Kamera	9.290.000,00	9.290.000,00
306	Lighting Head Body	9.453.612,17	9.453.612,17
307	Alat Penyimpanan Data	6.034.220,53	6.034.220,53
308	Alat Penyimpanan Data	6.034.220,53	6.034.220,53
309	Pesawat Telephone	3.500.000,00	3.500.000,00

310	Alat Komunikasi Radio HF/FM Lain-lain	3.099.000,00	3.099.000,00
159	Alat Komunikasi Radio HF/FM Lain-lain	3.099.000,00	3.099.000,00
160	Alat Komunikasi Radio HF/FM Lain-lain	3.099.000,00	3.099.000,00
161	Alat Komunikasi Radio HF/FM Lain-lain	3.099.000,00	3.099.000,00
162	Alat Pemancar VHF/FM Lain-lain	34.980.000,00	34.980.000,00
163	Peralatan Antena VHF/FM Lain-lain	2.497.000,00	2.497.000,00
164	Stabilizer	10.057.034,22	10.057.034,22
165	Baterai	7.610.000,00	7.610.000,00
TOTAL		5.670.656.108,16	5.670.656.108,16

b. Penambahan Aset Karena Mutasi Tambah Antar SKPD Tahun 2018 sebesar Rp 173.844.500,00

Tabel 5.21 Penambahan Aset Karena Mutasi Tambah Antar SKPD

No	Kode Barang	URAIAN	Mutasi Tambah Antar SKPD
1	02.03.01.01.03	Staion Wagon	173.844.500,00
Total			173.844.500,00

c. Penambahan Aset Belanja Modal Tahun 2018 sebesar Rp 1.350.604.980,00

Tabel 5.22 Penambahan Aset Belanja Modal Tahun 2018

No.	Kode Rekening	Nama Barang	Harga Barang
1	02.04.02.07.09	Tang	1.706.000,00
2	02.04.03.07.10	Scanner	5.900.000,00
3	02.04.03.07.10	Scanner	5.900.000,00
4	02.06.01.04.01	Lemari Besi	2.675.000,00
5	02.06.01.04.01	Lemari Besi	2.675.000,00
6	02.06.01.04.01	Lemari Besi	2.675.000,00
7	02.06.01.04.04	Filling Besi/Metal	2.375.000,00
8	02.06.01.04.04	Filling Besi/Metal	2.375.000,00
9	02.06.01.04.04	Filling Besi/Metal	2.375.000,00
10	02.06.01.04.04	Filling Besi/Metal	2.375.000,00
11	02.06.01.04.04	Filling Besi/Metal	2.375.000,00
12	02.06.01.04.04	Filling Besi/Metal	1.850.000,00
13	02.06.01.05.41	Genset	185.620.000,00

14	02.06.02.03.03	Mesin Potong Rumput	1.870.000,00
15	02.06.02.04.03	AC Unit	6.128.188,19
16	02.06.02.04.03	AC Unit	9.428.181,19
17	02.06.02.04.03	AC Unit	9.428.181,19
18	02.06.02.04.03	AC Unit	9.428.181,19
19	02.06.02.04.03	AC Unit	9.428.181,19
20	02.06.02.04.03	AC Unit	9.428.181,19
21	02.06.02.04.03	AC Unit	9.428.181,19
22	02.06.02.04.03	AC Unit	9.428.181,19
23	02.06.02.04.03	AC Unit	9.428.181,19
24	02.06.02.06.02	Radio	1.508.140,46
25	02.06.02.06.02	Radio	1.508.140,46
26	02.06.02.06.02	Radio	1.508.140,46
27	02.06.02.06.02	Radio	4.120.587,14
28	02.06.02.06.02	Radio	4.120.587,14
29	02.06.02.06.02	Radio	4.120.587,14
30	02.06.02.06.12	Wireless	4.615.606,96
31	02.06.02.06.12	Wireless	3.088.106,96
32	02.06.02.06.12	Wireless	3.088.106,96
33	02.06.02.06.12	Wireless	3.088.106,96
34	02.06.02.06.12	Wireless	3.088.106,96
35	02.06.02.06.12	Wireless	2.573.106,96
36	02.06.02.06.12	Wireless	2.573.106,96
37	02.06.02.06.12	Wireless	2.573.106,96
38	02.06.02.06.12	Wireless	2.573.106,96
39	02.06.02.06.37	Tangga Alumunium	3.118.700,00
40	02.06.02.06.51	Tandon Air	-
41	02.06.02.06.51	Tandon Air	-
42	02.06.03.02.01	P.C Unit/ Komputer PC	15.081.404,63
43	02.06.03.02.01	P.C Unit/ Komputer PC	15.081.404,63
44	02.06.03.02.02	Lap Top	12.693.800,00
45	02.06.03.02.02	Lap Top	12.243.800,00
46	02.06.03.02.03	Note Book	18.694.000,00
47	02.06.03.04.08	Printer	1.898.000,00
48	02.06.03.04.08	Printer	2.330.000,00
49	02.06.03.04.08	Printer	2.330.000,00
50	02.06.03.04.08	Printer	1.851.000,00
51	02.06.03.04.10	Scanner	4.734.500,00
52	02.06.03.05.02	Monitor	5.027.134,88
53	02.06.03.05.02	Monitor	5.027.134,88
54	02.06.03.05.02	Monitor	5.027.134,88
55	02.06.03.05.02	Monitor	5.027.134,88
56	02.06.03.05.02	Monitor	5.027.134,88
57	02.06.03.05.02	Monitor	5.027.134,88
58	02.06.03.05.11	UPS	32.625.760,00
59	02.06.03.05.11	UPS	1.500.000,00

60	02.06.03.06.01	Server	72.390.742,22
61	02.06.03.06.02	Router	2.580.246,30
62	02.06.03.06.02	Router	2.580.246,30
63	02.06.03.06.02	Router	2.580.246,30
64	02.06.03.06.02	Router	2.580.246,30
65	02.06.03.06.02	Router	2.580.246,30
66	02.06.03.06.02	Router	2.580.246,30
67	02.06.03.06.02	Router	2.580.246,30
68	02.06.03.06.02	Router	1.550.246,30
69	02.06.03.06.06	Peralatan Jaringan Lain-lain	3.339.872,29
70	02.06.03.06.06	Peralatan Jaringan Lain-lain	3.339.872,29
71	02.06.03.06.06	Peralatan Jaringan Lain-lain	3.339.872,29
72	02.06.03.06.06	Peralatan Jaringan Lain-lain	3.339.872,29
73	02.06.03.06.06	Peralatan Jaringan Lain-lain	3.339.872,29
74	02.06.03.06.06	Peralatan Jaringan Lain-lain	3.339.872,29
75	02.06.03.06.06	Peralatan Jaringan Lain-lain	3.339.872,29
76	02.06.03.06.06	Peralatan Jaringan Lain-lain	3.167.372,29
77	02.06.03.06.06	Peralatan Jaringan Lain-lain	3.167.372,29
78	02.06.03.06.06	Peralatan Jaringan Lain-lain	3.167.372,29
79	02.06.03.06.06	Peralatan Jaringan Lain-lain	3.857.372,29
80	02.06.03.06.06	Peralatan Jaringan Lain-lain	3.857.372,29
81	02.06.03.06.06	Peralatan Jaringan Lain-lain	3.857.372,29
82	02.06.03.06.06	Peralatan Jaringan Lain-lain	3.857.372,29
83	02.06.03.06.06	Peralatan Jaringan Lain-lain	3.857.372,29
84	02.06.03.06.06	Peralatan Jaringan Lain-lain	3.857.372,29
85	02.06.03.06.06	Peralatan Jaringan Lain-lain	3.857.372,29
86	02.06.03.06.06	Peralatan Jaringan Lain-lain	3.857.372,29
87	02.06.03.06.06	Peralatan Jaringan Lain-lain	17.654.000,00
88	02.06.03.06.06	Peralatan Jaringan Lain-lain	17.654.000,00
89	02.06.03.06.06	Peralatan Jaringan Lain-lain	17.654.000,00
90	02.06.03.06.06	Peralatan Jaringan Lain-lain	17.654.000,00
91	02.06.03.06.06	Peralatan Jaringan Lain-lain	17.654.000,00
92	02.06.03.06.06	Peralatan Jaringan Lain-lain	5.500.000,00
93	02.06.03.06.06	Peralatan Jaringan Lain-lain	5.500.000,00
94	02.06.03.06.06	Peralatan Jaringan Lain-lain	5.500.000,00
95	02.06.03.06.06	Peralatan Jaringan Lain-lain	5.500.000,00
96	02.06.03.06.06	Peralatan Jaringan Lain-lain	5.500.000,00
97	02.06.03.06.06	Peralatan Jaringan Lain-lain	5.500.000,00
98	02.06.03.06.06	Peralatan Jaringan Lain-lain	5.500.000,00
99	02.06.03.06.06	Peralatan Jaringan Lain-lain	5.500.000,00
100	02.06.03.06.06	Peralatan Jaringan Lain-lain	5.500.000,00
101	02.06.03.06.06	Peralatan Jaringan Lain-lain	5.500.000,00
102	02.06.03.06.06	Peralatan Jaringan Lain-lain	5.500.000,00
103	02.06.03.06.06	Peralatan Jaringan Lain-lain	5.500.000,00
104	02.06.03.06.06	Peralatan Jaringan Lain-lain	5.500.000,00
105	02.06.03.06.06	Peralatan Jaringan Lain-lain	5.937.060,00

106	02.06.03.06.06	Peralatan Jaringan Lain-lain	5.937.060,00
107	02.06.03.06.06	Peralatan Jaringan Lain-lain	5.937.060,00
108	02.06.03.06.06	Peralatan Jaringan Lain-lain	5.937.060,00
109	02.06.03.06.06	Peralatan Jaringan Lain-lain	3.500.000,00
110	02.06.03.06.06	Peralatan Jaringan Lain-lain	3.500.000,00
111	02.06.03.06.06	Peralatan Jaringan Lain-lain	3.500.000,00
112	02.06.03.06.06	Peralatan Jaringan Lain-lain	160.750.780,00
113	02.06.03.06.09	Antene	2.513.567,44
114	02.06.03.06.09	Antene	2.513.567,44
115	02.06.03.06.09	Antene	2.513.567,44
116	02.06.03.06.09	Antene	2.513.567,44
117	02.06.03.06.09	Antene	2.513.567,44
118	02.06.03.06.09	Antene	2.513.567,44
119	02.06.03.06.10	Switch Hub	6.457.669,56
120	02.06.03.06.10	Switch Hub	3.385.275,34
121	02.06.03.06.10	Switch Hub	3.385.275,34
122	02.06.03.06.10	Switch Hub	2.535.275,34
123	02.06.03.06.10	Switch Hub	2.535.275,34
124	02.06.03.06.10	Switch Hub	4.615.606,96
125	02.06.04.07.06	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	4.700.000,00
126	02.06.04.07.06	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	4.700.000,00
127	02.07.01.01.42	Microphone Connector Box	1.406.000,00
128	02.07.01.01.42	Microphone Connector Box	1.406.000,00
129	02.07.02.01.11	Pesawat Telephone	2.645.000,00
130	02.07.02.01.11	Pesawat Telephone	2.645.000,00
131	02.07.02.01.11	Pesawat Telephone	2.645.000,00
132	02.07.02.01.11	Pesawat Telephone	2.645.000,00
133	02.07.02.01.11	Pesawat Telephone	2.645.000,00
134	02.07.02.01.11	Pesawat Telephone	2.645.000,00
135	02.07.02.01.11	Pesawat Telephone	2.645.000,00
136	02.07.02.01.11	Pesawat Telephone	2.645.000,00
137	02.07.02.01.11	Pesawat Telephone	2.645.000,00
138	02.07.02.01.11	Pesawat Telephone	2.645.000,00
139	02.07.02.01.11	Pesawat Telephone	2.645.000,00
140	02.07.02.01.11	Pesawat Telephone	2.645.000,00
141	02.07.02.01.11	Pesawat Telephone	2.645.000,00
142	02.07.02.01.11	Pesawat Telephone	2.645.000,00
143	02.07.02.01.11	Pesawat Telephone	2.645.000,00
144	02.07.02.01.11	Pesawat Telephone	2.645.000,00
145	02.07.02.01.11	Pesawat Telephone	2.645.000,00
146	02.07.02.01.11	Pesawat Telephone	2.645.000,00
147	02.07.02.01.11	Pesawat Telephone	2.645.000,00
148	02.07.02.01.11	Pesawat Telephone	2.645.000,00
149	02.07.02.01.11	Pesawat Telephone	2.645.000,00
150	02.07.02.01.11	Pesawat Telephone	2.645.000,00
151	02.07.02.01.11	Pesawat Telephone	2.645.000,00

152	02.07.02.01.11	Pesawat Telephone	2.645.000,00
153	02.07.02.01.11	Pesawat Telephone	2.645.000,00
154	02.07.02.01.11	Pesawat Telephone	2.645.000,00
155	02.07.02.01.11	Pesawat Telephone	2.645.000,00
156	02.07.02.01.11	Pesawat Telephone	2.645.000,00
157	02.07.02.01.11	Pesawat Telephone	2.645.000,00
158	02.07.02.01.11	Pesawat Telephone	2.645.000,00
159	02.07.02.01.11	Pesawat Telephone	2.645.000,00
160	02.07.02.01.11	Pesawat Telephone	2.645.000,00
161	02.07.02.01.11	Pesawat Telephone	2.645.000,00
162	02.07.02.01.11	Pesawat Telephone	2.645.000,00
163	02.07.03.09.05	Antena	3.518.994,41
164	02.07.03.09.05	Antena	3.518.994,41
165	02.07.03.09.05	Antena	3.518.994,41
166	02.08.01.14.07	Tiang Keseimbangan	5.106.857,58
167	02.09.01.11.18	Drying Oven	3.000.000,00
168	02.09.01.11.18	Drying Oven	3.000.000,00
169	02.09.01.52.08	Protector	3.921.165,20
170	02.09.02.03.08	Kabel Listril	1.656.000,00
171	02.09.02.03.08	Kabel Listril	2.231.910,66
172	02.09.02.03.08	Kabel Listril	2.231.910,66
173	02.09.07.03.10	Tripod	2.100.000,00
174	02.10.05.01.04	CCTV	9.517.000,00
175	02.04.01.09.11	Elektrik Panel Cintrol	2.513.567,45
176	02.04.02.05.02	Tool Kit Boks	401.700,00
177	02.06.01.05.43	Mesin Pompa Air	560.000,00
178	02.06.01.05.49	Lampu Penerangan	137.000,00
179	02.06.02.06.12	Wireless	396.231,96
180	02.06.03.03.12	Hard Disk	850.000,00
181	02.06.03.04.08	Printer	1.438.000,00
182	02.07.02.01.25	Base Station	3.230.546,72
183	02.07.03.06.04	Peralatan Antena MF/MW Lain-lain	27.191.046,65
184	02.07.03.08.04	Peralatan Antena VHF/FM Lain-lain	7.985.893,68
185	02.09.01.08.10	Jack CBR	2.209.288,00
186	02.09.02.02.25	Pipa Plastik	11.860.250,05
187	02.09.02.03.01	Kotak Peti lengkap	4.218.368,98
188	02.09.02.03.08	Kabel Listril	25.216.336,93
189	02.09.02.04.25	Pipa Plastik	7.483.744,20
190	05.17.02.02.06	Buku Laporan Lain	59.180.000,00
		TOTAL	1.350.604.980,00

d. Penambahan Aset Belanja Barang dan Jasa Tahun 2018 sebesar Rp 2.700.000,00

Tabel 5.23 Penambahan Aset Belanja Barang dan Jasa Tahun 2018

No	Kode Barang	URAIAN	Barang Jasa 2018
1	02.06.02.06.51	Tandon Air	2.700.000,00
TOTAL			2.700.000,00

e. Pengurangan Terhadap Aset Tetap Ekstra Tahun 2018 sebesar Rp 95.691.974,62

Tabel 5.24 Pengurangan Terhadap Aset Tetap Ekstra Tahun 2018

No	Kode Barang	URAIAN	Ekstra 2017
1	02.04.01.09.11	Elektrik Panel Cintrol	2.513.567,45
2	02.04.02.05.02	Tool Kit Boks	401.700,00
3	02.06.01.05.43	Mesin Pompa Air	560.000,00
4	02.06.01.05.49	Lampu Penerangan	137.000,00
5	02.06.02.06.12	Wireless	396.231,96
6	02.06.03.03.12	Hard Disk	850.000,00
7	02.06.03.04.08	Printer	1.438.000,00
8	02.07.02.01.25	Base Station	3.230.546,72
9	02.07.03.06.04	Peralatan Antena MF/MW Lain-lain	27.191.046,65
10	02.07.03.08.04	Peralatan Antena VHF/FM Lain-lain	7.985.893,68
11	02.09.01.08.10	Jack CBR	2.209.288,00
12	02.09.02.02.25	Pipa Plastik	11.860.250,05
13	02.09.02.03.01	Kotak Peti Lengkap	4.218.368,98
14	02.09.02.03.08	Kabel Listrik	25.216.336,93
15	02.09.02.04.25	Pipa Listrik	7.483.744,20
TOTAL			95.691.974,62

f. Pengurangan Terhadap Aset Tetap Mutasi Kurang Reklas Antar KIB Tahun 2018 sebesar Rp 73.580.000,00 dari Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Lainnya

Tabel 5.25 Pengurangan terhadap Aset Tetap Mutasi Kurang Reklas Antar KIB Tahun 2018

No	Kode Barang	URAIAN	Reklas Antar KIB 2018
1	05.17.02.02.06	Buku Laporan Lain-lain	59.180.000,00
2	02.06.03.06.06	Peralatan Jaringan Lain-Lain	4.400.000,00
3	02.06.03.06.09	Antene	10.000.000,00
TOTAL			73.580.000,00

g. **Penambahan Aset Belanja Modal Tahun 2018 sebesar Rp 1.350.604.980,00**

h. **Pengurangan Penghapusan Tahun 2018 sebesar Rp. 251.259.728,29**

Tabel 5.26 Pengurangan Penghapusan Tahun 2018

No	Kode Barang	URAIAN	Penghapusan 2018
1	02.06.02.04.06	Kipas Angin	1.500.000,00
2	02.06.02.07.01	Alat Pemadam Portable	1.400.000,00
3	02.06.03.05.04	Scanner	1.248.700,00
4	02.06.03.06.06	Peralatan Jaringan Lain-lain	6.080.400,00
5	02.06.03.06.06	Peralatan Jaringan Lain-lain	2.800.000,00
6	02.06.03.06.06	Peralatan Jaringan Lain-lain	3.080.000,00
7	02.06.03.06.06	Peralatan Jaringan Lain-lain	1.250.000,00
8	02.06.03.06.06	Peralatan Jaringan Lain-lain	1.400.000,00
9	02.06.03.06.06	Peralatan Jaringan Lain-lain	49.800.000,00
10	02.06.03.06.09	Antene	2.000.000,00
11	02.10.05.01.04	CCTV	88.000.000,00
12	02.10.05.01.04	CCTV	90.495.000,00
13	02.06.04.03.06	Kursi Pejabat Eselon IV	2.205.628,29
TOTAL			251.259.728,29

5.3.3.3. Gedung dan Bangunan

31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
<u>4.375.464.422,23</u>	<u>0,00</u>

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo per 31 Desember 2018	
2	Koreksi Kurang	
3	Koreksi Tambah	
4	Saldo Awal 2018	
5	Penambahan :	
	a. Belanja Modal 2018	3.708.146.997,81
	b. Retensi 5%	
	c. Belanja Pegawai 2018	
	d. Belanja Barang Jasa 2018	
	e. BOP/BOS/BOM	
	f. Hibah	
	g. Penambahan KDP	
	h. Mutasi Tambah	
	Jumlah Penambahan	4.375.464.422,23
6	Pengurangan :	
	a. Pengurangan KDP	
	b. Non Aset	
	c. Ekstra	
	d. Penghapusan	
	e. Pengembalian Dana	
	f. Reklas ke KIB E	
	g. Mutasi Kurang	
	Jumlah Pengurangan	-
	Total Kenaikan Tahun 2018	
	Saldo Per 31 Desember 2018	4.375.464.422,23

5.3.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

31 Desember 2018	31 Desember 2017
(Rp)	(Rp)
0,00	66.020.000,00

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo awal 2018	
	a. Koreksi Kurang	
	b. Koreksi Tambah	
2	Saldo setelah koreksi	
3	Penambahan :	
	a. Belanja Modal 2018	-
	b. Retensi 5%	
	c. BOP/BOS/BOM	
	d. Mutasi Tambah	
	Jumlah Penambahan	-
4	Pengurangan	
	a. KDP	
	b. Non Aset	
	c. Pengembalian Dana	
	d. Mutasi Kurang	
	Jumlah Pengurangan	0,00
5	Saldo Akhir 2018	0,00

5.3.3.5 Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2018
(Rp)
484.160.000,00

31 Desember 2017
(Rp)
424.980.000,00

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo Akhir 2018	
	a. Koreksi Tambah	
	Saldo Awal 2018	
2	Penambahan :	
	a. Belanja Modal 2018	
	b. Belanja Barang Jasa 2018	-
	c. BOP/BOS/BOM	
	d. Hibah	
	e. Mutasi Tambah	
	f. Reklas Antar KIB	59.180.000,00
	Jumlah Penambahan	59.180.000,00
3	Pengurangan :	
	a. Ekstra	
	b. Penghapusan	
	c. Mutasi Kurang	
	Jumlah Pengurangan	-
	Total Penambahan Tahun 2018	59.180.000,00
	Jumlah	59.180.000,00

A. Penambahan Saldo Aset Tetap Lainnya Tahun 2018 Belanja Barang dan Jasa 2018 sebesar Rp. 284.125.333,33

Tabel. 5.27 Penambahan Saldo Aset Tetap Lainnya Tahun 2018 Belanja Barang dan Jasa

NO.	URAIAN	NILAI (Rp)
1.	Aset Renovasi	97.916.000,00
2.	Aset Renovasi	186.209.333,33
Total		284.125.333,33

B. Penambahan Saldo Aset Tetap Lainnya, Reklas Antar KIB Tahun 2018 sebesar Rp. 179.740.000,00

Tabel. 5.28 Penambahan Saldo Aset Tetap Lainnya Reklas Antar KIB Tahun 2018

NO.	URAIAN	NILAI (Rp)
1	Buku Laporan Lain-lain	49.900.000,00
2	Buku Laporan Lain-lain	19.750.000,00
3	Buku Laporan Lain-lain	50.910.000,00
4	Buku Laporan Lain-lain	59.180.000,00
Total		179.740.000,00

5.3.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

31 Desember 2018
(Rp)
0,00

31 Desember 2017
(Rp)
0,00

5.3.3.7 Akumulasi Penyusutan

31 Desember 2018
(Rp)
3.460.626.677,32

31 Desember 2017
(Rp)
2.035.048.811,90

Tabel. 5.29 Akumulasi Penyusutan

No	Uraian	Nilai Rp
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	3,173,900,729.61
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	259,829,281.05
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	6,602,000.00
4	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	20,294,666.67
Jumlah Akumulasi Penyusutan Tahun 2018		3,460,626,677.32

5.3.4 Dana Cadangan

31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
0,00	0,00

5.3.5 Aset Lainnya

31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
14.400.000,00	0,00

5.3.5.1 Aset Tak Berwujud

31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
0,00	1.800.000,00

No	Uraian	
1	Saldo awal	-
2	Koreksi Kurang	-
3	Koreksi Tambah	-
	Saldo Awal 2018	-
2	Penambahan :	
	a. Belanja Modal 2018	-
	b. Belanja Barang jasa 2018	-
	c. Mutasi Tambah	-
	Jumlah Penambahan	-
3	Pengurangan :	
	a. Penghapusan	-
	b. Mutasi Kurang	-
	Jumlah Pengurangan	-
	Total Penambahan Tahun 2018	
	Jumlah	-

5.3.5.2 Amortisasi Aset Tak Berwujud

31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
<u>(720.000,00)</u>	<u>(360.000,00)</u>

5.3.6 Kewajiban

31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
<u>8.808.456.548,16</u>	<u>11.015.924.902,00</u>

Tabel. 5.30 Utang Beban

No	Uraian	31-Des-18	31-Des-17
1	Utang Beban	7.197.402,00	5.647.292,00
2			
3			
Jumlah		7.197.402,00	5.647.292,00

5.3.6.1 Kewajiban Jangka Pendek

5.3.6.2 Utang Perhitungan Pihak Ketiga

31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

5.3.6.3 Utang Bunga

31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

5.3.6.4 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

5.3.6.5 Pendapatan Diterima Dimuka

31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
0,00	0,00

5.3.2.6 Utang Belanja

31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
7.197.402,00	5.647.292,00

Tabel. 5.31 Utang Belanja

No	Keterangan	31 Desember 2018
1	Utang Belanja Listrik	7.197.402,00
2	Utang Belanja Telepon	-
	Jumlah	7.197.402,00

5.3.2.7 Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
8.808.456.548,16	4.134.860.296,26

5.4. Laporan Operasi

5.4.1. Pendapatan-LO

31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
0,00	0,00

5.4.2. Beban-LO

31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
7.373.026.063,37	7.623.046.813,33

Tabel. 5.32 Beban LO

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/ Penurunan
		(Rp)	(Rp)	(%)
1	Beban Operasi	7.373.026.063,37	7.623.046.813,33	-
2	Beban Transfer			-
TOTAL		7.373.026.063,37	7.623.046.813,33	-

5.4.2.1. Beban Operasi

31 Desember 2018
(Rp)

7.373.026.063,37

31 Desember 2017
(Rp)

7.623.046.813,33

Tabel 5.33 Rincian Beban Operasi

No	Uraian	2018	2017	Kenaikan/ Penurunan (%)
		(Rp)	(Rp)	
1	Beban Pegawai	3.160.981.906,00	2.658.066.431,00	-
2	Beban Barang dan Jasa	2.711.232.852,00	3.930.719.542,00	-
3	Beban Hibah	-	-	-
4	Beban Bantuan Sosial	-	-	-
5	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.500.811.305,37	1.034.260.840,33	-
6	Beban Lain-lain	-	-	-
TOTAL		7.373.026.063,37	7.623.046.813,33	-

5.4.2.2. Beban Pegawai

31 Desember 2018
(Rp)

3.160.981.906

31 Desember 2017
(Rp)

2.658.066.431,00

Beban Pegawai Pemerintah Kota Banjarbaru Per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 3.160.981.906,00 Nilai tersebut dapat dirincikan pada tabel berikut

Tabel 5.34 Rincian Beban Pegawai

No	Keterangan	Saldo tahun 2017	Saldo tahun 2018	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan	1.805.164.159,00	1.875.090.997,00		-
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS	825.527.272,00	1.285.890.909,00		-
3	Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	-			-
4	Beban Biaya Pemungutan Pajak Daerah	-			-
5	Beban Penghasilan Lainnya	-			-
6	Beban Honorarium PNS	27.375.000,00			-
7	Beban Honorarium Non PNS				-
8	Beban Uang Lembur				-
9	Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat				-
10	Beban Belanja Pegawai Operasional BLUD				-
		2.658.066.431,00	3.160.981.906,00		

5.4.2.3. Beban Barang Dan Jasa

**31 Desember 2018
(Rp)**

2.711.232.852,00

**31 Desember 2017
(Rp)**

3.930.719.542,00

Tabel 5.35 Rincian Beban Barang dan Jasa

No	Keterangan	Saldo tahun 2017	Saldo tahun 2018	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Beban Bahan Pakai Habis	100.485.494,00	251.707.881,00		-
2	Beban Bahan/Material				-
3	Beban Jasa Kantor	2.397.349.873,00	1.007.090.303,00		-
4	Beban Premi Asuransi				-
5	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	14.164.700,00	20.355.300,00		-
6	Beban Cetak dan Penggandaan	122.026.600,00	127.322.550,00		-
7	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Par kir				-
8	Beban Sewa Sarana Mobilitas				-
9	Beban Sewa Alat Berat				-
10	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor		12.000.000,00		-
11	Beban Makanan dan Minuman	146.441.000,00	262.655.500,00		-
13	Beban Pakaian Kerja				-
14	Beban Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	18.350.000,00	11.500.00,00		-
15	Beban Perjalanan Dinas	400.884.875,00	345.969.658,00		-
16	Beban Beasiswa Pendidikan PNS				-
17	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan	80.880.000,00	54.700.000,00		-

	Bimbingan Teknis PNS				
18	Beban Pemeliharaan	183.117.000,00	250.649.550,00		-
19	Beban Jasa Konsultansi	263.065.000,00			-
20	Beban Honorarium Non PNS - LO	210.150.000,00	280.430.000,00		
TOTAL		3.936.914.542,00	2.624.380.742,00	-	

Cat : Terdapat selisih Rp. 67.368.918,- disebabkan bendahara fokus pada pengembalian kas tunai senilai 136.712.782,- sehingga sisa uang yang terdapat direkening menjadi saldo Bank. Dan terdapat selisih antara BKU dengan rekening koran senilai Rp. 1.816,- disebabkan adanya Jasa Giro yang tidak tersetor ke kas daerah dikarenakan belum adanya surat kuasa dari Kepala Dinas Kominfo Kota Banjarbaru kepada Pihak Bank Kalsel untuk memindah secara otomatis ke kas daerah. Dan jumlah tersebut sdh disetorkan ke kas daerah (bukti terlampir)

5.4.2.4. Beban Hibah

31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
<u>1.160.517.424,42</u>	<u>0,00</u>

5.4.2.5. Beban Bantuan Sosial

31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

5.4.2.6. Beban Penyusutan Dan Amortisasi

31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
<u>1.500.811.305,37</u>	<u>1.034.260.840,33</u>

Tabel 5.36 Beban Penyusutan dan Amortisasi

No	SKPD	Total
1	Peralatan dan Mesin	1.227.173.690,99
2	Gedung dan Bangunan	259.829.281,05
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.301.000,00
4	Aset Tetap Lainnya	10.147.333,33
5	Aset Tak Berwujud	360.000,00
TOTAL		1.500.811.305, 37

5.4.2.7. Beban Penyisihan Piutang

31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

5.4.2.8. Beban Pegawai BOS

31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
0,00	0,00

5.4.2.9 Beban Transfer

31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
0,00	0,00

5.4.2.10. Surplus/Defisit-LO

31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
(6.324.790.141,58)	(7.623.046.813,33)

Tabel 5.37 Surplus/Defisit LO

No	Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Surplus/ Defisit Kegiatan Operasional	(6.212.508.638,95)	(15.246.093.626,66)	-
2	Beban Transfer		-	-
3	Defisit Akibat Penghapusan Aset	(112.281.502,63)	-	-
Jumlah		(6.324.790.141,58)	-	

5.5. Laporan Perubahan Ekuitas

Tabel 5.3 Laporan Perubahan Ekuitas

Uraian	2018
EKUITAS AWAL	4.129.213.004,26
SURPLUS/DEFISIT - LO	(6.324.790.141,58)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :	
Koreksi Kurang Catat Kas	0,00
Koreksi Lebih Catat Kas	0,00
Koreksi Kurang Catat Piutang	0,00
Koreksi Kurang Catat Penyisihan Piutang	0,00
Koreksi Lebih Catat Piutang	0,00
Koreksi Lebih Catat Penyisihan Piutang	0,00
Koreksi Kurang Catat Persediaan	0,00

Koreksi Lebih Catat Persediaan	0,00
Koreksi Lebih Catat Aset	0,00
Koreksi Lebih Catat Akumulasi Penyusutan Aset	0,00
Koreksi Kurang Catat Aset	0,00
Koreksi Kurang Catat Akumulasi Penyusutan Aset	0,00
Koreksi Kurang Catat Utang Jangka Pendek	0,00
Koreksi Lebih Catat Utang Jangka Pendek	0,00
Koreksi Kurang Catat Pendapatan Diterima Dimuka	0,00
Koreksi Lebih Catat Pendapatan Diterima Dimuka	0,00
Mutasi Masuk Kas	0,00
Mutasi Keluar Kas	0,00
Mutasi Masuk Penyisihan Piutang	0,00
Mutasi Keluar Piutang	0,00
Mutasi Masuk Penyisihan Piutang	0,00
Mutasi Masuk Persediaan	0,00
Mutasi Keluar Persediaan	0,00
Mutasi Masuk Aset Antar SKPD	173.844.500,00
Mutasi Masuk Akumulasi Penyusutan /Amortisasi	(74.504.785,71)
Mutasi Keluar Aset Antar SKPD	0,00
Mutasi Keluar Akumulasi Penyusutan /Amortisasi	0,00
Reklasifikasi menjadi Aset Extracompatabel	0,00
Reklasifikasi Extracompatabel jadi Aset	(95.691.974,62)
Koreksi Kurang Catat Nilai Aset Tahun Sebelumnya	0,00
Akumulasi Penyusutan Kurang Catat Nilai Aset Tahun Sebelumnya	0,00
Koreksi Lebih Catat Nilai Aset Tahun Sebelumnya	0,00
Akumulasi Penyusutan Lebih Catat Nilai Aset Tahun Sebelumnya	0,00
Mutasi Tambah Persediaan Karena Perubahan SOPD	0,00
Mutasi Keluar Persediaan Karena Perubahan SOPD	0,00
Mutasi Keluar Aset Tetap Perubahan SOPD	0,00
Akumulasi Penyusutan Mutasi Keluar Aset Perubahan SOPD	
Mutasi Masuk Aset Perubahan SOPD	0,00
Akumulasi Penyusutan Mutasi Masuk Aset Perubahan SOPD	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan	0,00
Koreksi Ekuitas Lain-Lain	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DI KONSOLIDASIKAN	10.993.188.543,81
EKUITAS AKHIR	8.801.259.146,16

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

Pemerintah Kota Banjarbaru menggunakan sistem akuntansi berbasis komputer yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran. *Output* yang dihasilkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014. Neraca merupakan sub sistem keuangan yang terpisah dari SIKD. Pemerintah Kota Banjarbaru telah melakukan konversi laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan merujuk kepada Buletin Teknis No.3 Tahun 2011 tentang Penyajian Laporan Keuangan Daerah sesuai SAP dengan konversi yang dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tanggal 29 November 2017, terbit Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 81 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banjarbaru. Peraturan ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat(5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah yang merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banjarbaru.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru merupakan SKPD baru yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru diatur oleh Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 64 Tahun 2016.

Di tahun pertama berdirinya, Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Dr.H. Burhanuddin Noor, SE, M.Si yang pensiun pada tanggal 1 September 2017. Selanjutnya, pelaksana tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

adalah Johan Arifin, AP, MM yang juga merupakan Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru. Kemudian pada tanggal 24 Januari 2018 dilantik sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru.

Sebagian besar aset pada Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan mutasi dari Dinas Perhubungan dan Bagian Pembangunan Setdako Kota Banjarbaru.

BAB VII

PENUTUP

Kewajiban menyajikan laporan keuangan pada akhir tahun 2018 sebagai wujud akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban keuangan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru selaku entitas akuntansi yang telah dilaksanakan dari awal sampai akhir tahun anggaran. Hasil akhir laporan keuangan dalam bentuk : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas Beban dan rekonsiliasinya.

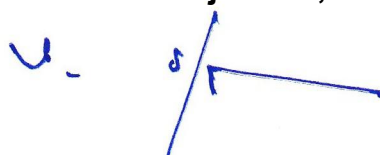
Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, disajikan dengan harapan dapat memberikan gambaran lebih rinci melalui perangkaan Beban maupun pembiayaan pada kurun waktu satu tahun anggaran.

Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru merupakan salah satu media informasi Keuangan Daerah untuk mengukur kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun anggaran berjalan sekaligus sebagai alat kontrol, kendali dan pengawasan.

Akhirnya dengan senantiasa berserah diri kepada-Nya semoga Allah SWT, senantiasa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kita lakukan, untuk mewujudkan akuntabilitas dan tata kelola keuangan Pemerintah Kota Banjarbaru yang lebih baik.

Banjarbaru, 14 Februari 2019

**Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kota Banjarbaru,**



JOHAN ARIFIN, AP, MM
Pembina Tk.I

NIP.19750328 199501 1 001